SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 117

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan.	√			

Soreang, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

ASEP KUSUMAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. 5892909 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : dlh@bandungkab.go.id.
Website : http://www.dlh.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.405-DLH/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja dan Perubahan Renja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Teknis Penyusun Renja Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutahirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

21. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bandung Tahun 2021-2026

23. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah;

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

26. Peraturan Bupati bandung Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

28. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 008.1.1/Kep.131-Bapperida/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

c. melaksanakan koordinasi intern Tim Teknis Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025

e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tepat waktu;

g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 12 Januari 2024

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

ASEP KUSUMAH, S.SOS.,M.SI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720105 199101 1 003

LAMPIRAN I
NOMOR : 050/Kep.405-DLH/2024
TANGGAL : 11 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN PERSONALIA
TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	Anggota
5.	Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan	Anggota
8.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah	Anggota
10.	Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay	Anggota
11.	Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek	Anggota
12.	Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang	Anggota
13.	Kepala UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Anggota
14.	Analis Perencanaan Anggaran	Kesekretariatan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

ASEP KUSUMAH, S.SOS.,M.SI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720105 199101 1 003



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.
(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan
d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan rancangan yang mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan telah disusun untuk mendukung "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera**" terutama pada misi ke-3 yaitu " Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang menunjang tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berawasan lingkungan" dan misi ke-4 yaitu Mengoptimalkan tatakelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan". Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah :

a. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
b. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah;
c. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

a. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
b. Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan instansi Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, pada tahap Rancangan Akhir ini telah dilakukan beberapa penyesuaian belanja yaitu terhadap musrenbang, Pokir , belanja wajib mengikat serta penyesuain terhadap kegiatan hasil Rembug Bedas.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rancangan Awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Soreang, 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

ASEP KUSUMAH, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

BANDUNG BEDAS!

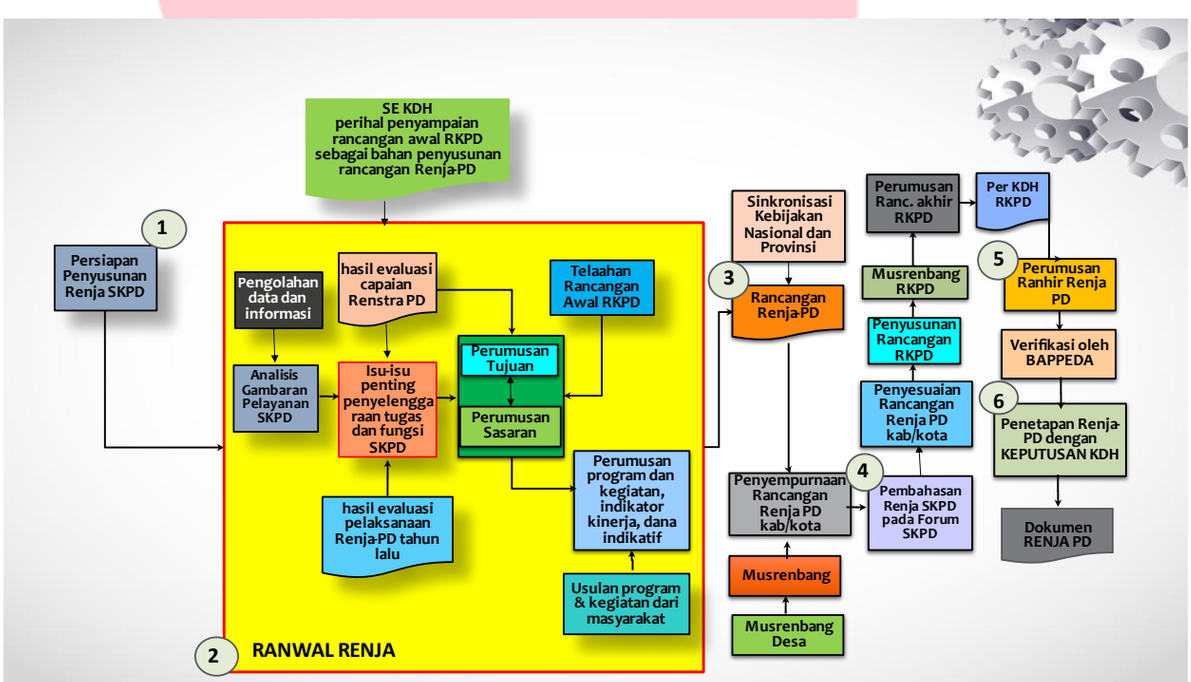
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah (Renja PD). Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Permendagri 86/2017). Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten



Dari beberapa tahapan di atas, Proses Penyusunan Rancangan Renja telah dilalui dan Forum Perangkat Daerah telah dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2024 dan adanya sinkronisasi Belanja Pokir serta belanja wajib mengikat lainnya. Oleh

karena itu, pada proses penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan sinkronisasi antara Rancangan Awal dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, belanja Pokir dan belanja wajib mengikat lainnya. Sehingga disusunlah dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

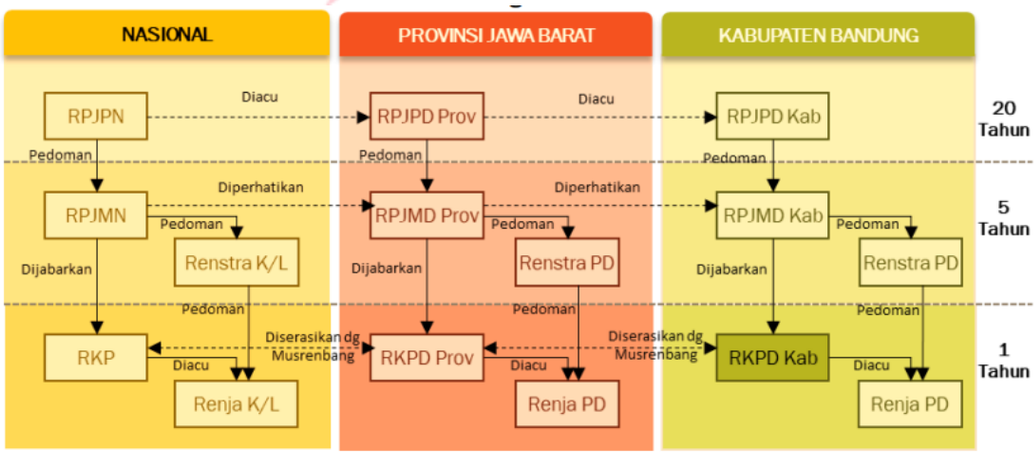
Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 mengacu pada Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga sinergitas perencanaan daerah dengan perencanaan di level nasional dan provinsi serta mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 selain mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dalam lingkup Kabupaten Bandung, juga mengacu pada arahan, kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam lingkup dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis Bapprida Kabupaten Bandung pada tahun 2022 dapat dilihat keterkaitan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD Daerah serta dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.2

Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap

Dokumen-Dokumen Perencanaan



Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2022

Adapun Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2024 berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) Pemutakhiran Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor … Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 100);

36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
37. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 66);
38. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 No 62);
39. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92).
40. Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1/Kep.131-Bapperida/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini disusun dengan maskud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud
   1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis DLH Kabupaten Bandung ke dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025.
   2) Menjadi pedoman bagi DLH Kabupaten Bandung dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 .

b. Tujuan
   1) Untuk mengarahkan seluruh kegiatan DLH Kabupaten Bandung selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025 sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra.
   2) Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja DLH Kabupaten Bandung selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja DLH Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DLH Kabupaten Bandung, proses penyusunan Renja DLH Kabupaten Bandung, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH Kabupaten Bandung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH Kabupaten Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Bandung tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH Kabupaten Bandung berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Bandung tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Bandung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DLH KABUPATEN BANDUNG

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH digunakan sebagai kontrol terhadap kualitas lingkungan, yang terdiri dari agregat Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH secara prinsip mewakili isu coklat (brown issues) dan isu hijau (green issues). Isu coklat merupakan isu terkait pencemaran lingkungan, yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan, yang dijabarkan dengan indikator kualitas air dan udara serta memiliki bobot yang sama untuk setiap indikator. Sementara, isu hijau merupakan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek konservasi dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data IKLH tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, diketahui bahwa capaian IKLH Kabupaten Bandung terus meningkat. Capaian IKLH Kabupaten Bandung pada tahun 2023 yaitu sebesar 56,58 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,55 poin. Capaian tersebut masih tergolong dalam kategori sedang berasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kulitas Lingkungan Hidup. Dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan berbagai inovasi salah satunya melalui program Kampung Bedas. Program tersebut hadir dalam rangka menangani berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Bandung. Melalui program Kampung Bedas, Kabupaten Bandung berhasil menurunkan timbulan sampah tahun 2018-2021 berturut-turut sebesar 16,94%, 21,35%, 21,25%, dan 37,45%. Program Kampung Bedas bersama-sama dengan program Bidang Lingkungan Hidup lainnya berkontribusi pada peningkatan IKLH Kabupaten Bandung tahun 2019-2023 berturut-turut sebesar 51,69; 53,57;

54,78; 56,03; dan 56,58. Berkaitan dengan upaya penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Bandung salah satunya melalui DLH dengan kolaborasi bersama perangkat daerah lain juga melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk menurunkan emisi GRK diantaranya melalui:

- Mendorong penggunaan pupuk organic dan pembatasan pupuk kimia (fasilitasi rumah kompos, fasilitasi alat pengolahan pupuk organic, peningkatan keterampilan dan teknologi pengolahan pupuk organic bagi kelompok usaha, revitaslisasi komisi Pengawasan Pupuk Kab Bandung)
- Penerapan Car Free Daya di Jalan Al Fathu dan Komplek Pemda
- Penanaman di lahan-lahan kritis, dan
- Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

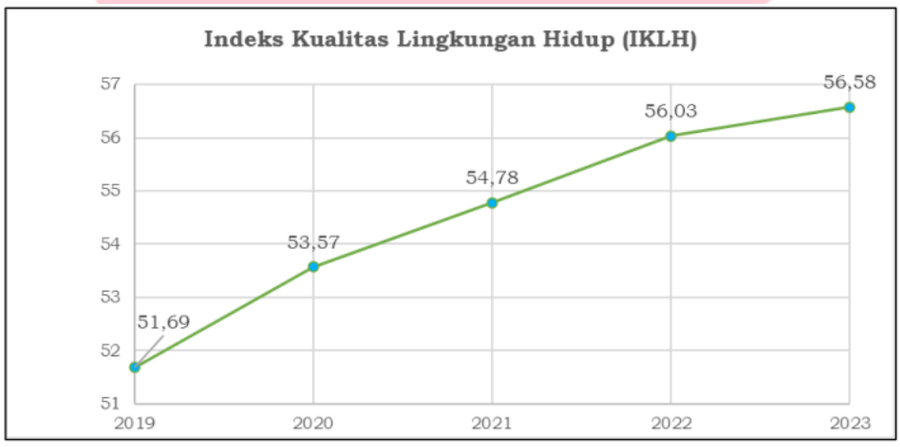
Disamping itu, Kabupaten Bandung juga menjadi bagian dari program Citarum Harum, beberapa kontrubusi Kabupaten Bandung terhadap program Citarum Harum diantaranya yaitu:

- Pelaksanaan konsep Mikro DAS menggunakan aplikasi Simpelbedas
- Pemasangan Automatic Water Level Recorder (AWLR) pada beberapa Sub DAS di Bendungan Cibeureum Desa Sadu Kecamatan Soreang dan wilayah Kecamatan Cimenyan, Ciwidey, Cirasea, Citarik dan CIkeruh.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Grafik peningkatan IKLH Kabupaten Bandung



Sedangkan untuk capaian kinerja pengelolaan sampah dapat dilihat pada table berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Pada PK	Realisasi	(+)/(-)	% (Realisasi/Target)
Meningkatnya Kinerja pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang terkelola	80,93%	81,09%	(+) 0,16%	100,20%
Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah	Persentase Pengurangan Sampah	54,85%	50,68%	(-) 4,17%	92,18%
	Persentase Penanganan Sampah	26,08%	30,41%	(+) 4,33%	116,60%

Adapun capaian kinerja untuk tata Kelola pemerintahan dapat dilihat pada table berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,75	84,19	108,28%
	Nilai AKIP	77,5 (BB)	84,10 (A)	108,52%
	Persentase Asset dalam Kondisi Baik	92%	93,08%	101,17%

Berikut ini merupakan rincian evaluasi pelaksanaan renja DLH Kabupaten Bandung tahun 2023 dan capaian Renstra DLH Kabupaten Bandung.

BANDUNG BEDAS!

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2023
Kabupaten Bandung

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	300%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	**1 1**	**2**	**2**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Peresentase Capaian Kegiatan terkait RPPLH yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**300**	**300%**
2	1 1	2	2	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	-Jumlah kajian Lingkungan	1	Dokumen RPPLH	1	Dokumen	0	Dokumen RPPLH	0	Dokumen RPPLH	100%	-	Dokumen	1	100%
							1	Dokumen Kajian lingkungan KBS	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	-	0%
							1	Perda RPPLH	0	Perda RPPLH	0	Perda RPPLH	0	Perda RPPLH	0%	0	Perda RPPLH	-	0%
						-Jumlah Kegiatan Pendahuluan Penyusunan RPPLH Kabupaten	2	Sosialisasi hasil Kajian dan Perda RPPLH	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0%	0	Kegiatan	1	50%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
						Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	100%
2	11	2	2	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan SPPL	250	Dokumen	100	Dokumen	50	Dokumen	50	Dokumen	100%	50	Dokumen	200	80%
						Jumlah Monev Dokumen lingkungan	125	Kegiatan	50	Kegiatan	25	Kegiatan	25	Kegiatan	100%	25	Kegiatan	100	100%
							0	paket Sistem informasi dokumen lingkungan	0	paket Sistem informasi dokumen lingkungan	0	paket Sistem informasi dokumen lingkungan	0	paket Sistem informasi dokumen lingkungan	0%	0	paket Sistem informasi dokumen lingkungan	-	0%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
							0	Kegiatan pemeliharaan/ Upgrade Sistem	0	Kegiatan pemeliharaan/ Upgrade Sistem	0	Kegiatan pemeliharaan/ Upgrade Sistem	0	Kegiatan pemeliharaan/ Upgrade Sistem	0%	0	Kegiatan pemeliharaan/ Upgrade Sistem	-	0%
							1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	-	0%
							4	Sosialiasi	0	Sosialiasi	0	Sosialiasi	0	Sosialiasi	0%	0	Sosialiasi	-	0%
						-Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	4	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	75%
						-Jumlah Industri yang menerapkan produksi bersih	4	Sosialisasi	1	Sosialisasi	1	Sosialisasi	1	Sosialisasi	100%	1	Sosialisasi	3	50%
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-Persentase lokasi titik pantau kualitas air**	**60**	**%**	**0**	**%**	**33,33**	**%**	**33,33**	**%**	**100%**	**26,7**	**%**	**60,03**	**100%**

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(10/4)
						-Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	32,25	%	0	%	19,35	%	19,35	%	100%	16,1	%	35,45	110%
						-Penambahan luas tutupan lahan	23435	ha	0	%	50	ha	50	ha	100%	6	Ha	56	0%
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	25	lokasi	20	Lokasi	20	lokasi	20	lokasi	100%	20	lokasi	60	240%
						- Jumlah lokasi titik pantau kualitas udara	24	lokasi	20	Lokasi	20	lokasi	20	lokasi	100%	20	lokasi	60	250%
						-Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	-	0%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Tersedianya data kualitas air	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	100%
						- Tersedianya data kualitas udara	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	100%
2	1 1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-Jumlah bimtek pengendalian Perubahan Iklim	6	Kegiatan	2	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	4	50%
						-Jumlah sosialisasi Bimtek Sosialisasi KSDA	10	Kegiatan	2	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%	-	Kegiatan	5	50%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
		-Jumlah SR	50 SR	1 SR	21 SR	21 SR	100%	-	SR	22	44%
		-Jumlah IPAH	25 unit	0 unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	Unit	5	20%
		-Jumlah bor biopori	1400 unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	0%	-	Unit	-	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	Dokumen	2	100%
		Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	2	Laporan	2	100%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	11	3	2	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan alat uji terhadap parameter baku mutu	80	%	52	%	40	%	40	%	100%	-	%	92	115%
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2607	Dokumen	0	Dokumen	2607	Dokumen	3.358	Dokumen	**129%**	0	Dokumen	3.358	129%
2	**11**	**3**	**2**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**-Jumlah lokasi pencemaran yang ditanggulangi**	**6**	**Lokasi**	**1**	**Lokasi**	**1**	**Lokasi**	**1**	**Lokasi**	**100%**	**-**	**Lokasi**	2	33%
						- Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	**20**	**lokasi**	**40**	**Lokasi**	**20**	**lokasi**	**20**	**lokasi**	**0**	**20**	**lokasi**	**80**	**400%**

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						- Jumlah lokasi titik pantau kualitas udara	**20**	**lokasi**	**40**	**Lokasi**	**20**	**lokasi**	**20**	**lokasi**	**0**	**20**	**lokasi**	**80**	**400%**
						- Jumlah informasi lingkungan hidup	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**-**	**Dokumen**	2	200%
						Persentase lokasi/titik pencemaran yang ditanggulangi	**100**	**%**	**0**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**0%**	**100**	**%**	200	200%
2	11	3	2	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	**1**	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	2	200%
						- Tersedianya data kualitas air	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	25%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						- Tersedianya data kualitas udara	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	25%
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	3	30%
2	1 1	3	2	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah demplot infrastruktur pengolahan air limbah	5	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100%	0	Lokasi	2	40%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	5	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100%	1	Lokasi	3	60%
2	11	3	2	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Industri yang menerapkan produksi bersih	2	Sosialisasi	1	Sosialisasi	1	Sosialisasi	1	Sosialisasi	100%	0	Sosialisasi	2	100%
2	**11**	**3**	**2**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah area tertanami (ha)**	**217**	**ha**	**118**	**Ha**	**50**	**ha**	**79,32**	**ha**	**159**	**50**	**ha**	247	114%
2	11	3	2	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-Jumlah Sosialisasi/ Bimtek/ Kampanye	**10**	Kegiatan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	**0%**	0	Kegiatan	2	20%
						-Jumlah Honor Badega	15	Orang	15	Orang	0	Orang	0	Orang	**0%**	0	Orang	15	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						-Jumlah Honor persemaian	6	Orang	6	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	6	100%
						-Jumlah Sarana dan Prasarana pemeliharaan	5	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0%	0	Kegiatan	1	20%
						-Jumlah Koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0%	0	Kegiatan	1	20%
						-Tersusunnya IKTL	5	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	20%
						-Jumlah Pembangunan persemaian	30	Unit	6	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	6	20%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	4	Dokumen	0	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	125%
2	**1 1**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pembangunan Taman Kehati**	**100**	**%**	**17,5**	**%**	**15**	**%**	**15**	**%**	**100%**	**15,00**	**%**	**48**	**48%**

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	**1 1**	**4**	**2**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**-Persentase vegetasi tertanam**	**100**	**%**	**20**	**%**	**15**	**%**	**15**	**%**	**100%**	**15**	**%**	**50**	**50%**
						-Persentase infrastruktur terbangun	**100**	**%**	**15**	**%**	**15**	**%**	**15**	**%**	**100%**	**15**	**%**	**45**	**45%**
2	1 1	4	2	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	-Jumlah DED	5	dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	-	0%
						-Jumlah FS	4	dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	-	0%
2	1 1	4	2	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	-Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	0	Laporan	1	20%
						-Jumlah pemelihara	4	Pemeliha ra	4	Pemeliha ra	4	Pemeliha ra	4	Pemeliha ra	100%	0	Pemelihar a	8	200%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10,80	Ha	10,80	Ha	10,80	Ha	10,80	Ha	0%	10,80	Ha	32	300%
2	1 1	4	2	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-Jumlah laporan database RTH dan profil pemelihara	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	25%
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Ha	3	Ha	3	Ha	3	Ha	100%	3	Ha	9	300%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap perizinan berusaha (aspek lingkungan) dan Sertifikat Layak Operasi	75	%	71,3	%	70	%	73,7	%	105%	70	%	215	287%
2	1 1	6	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	100	%	100%	%	100	%	100	%	100%	100	%	201	201%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	6	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/kegiatan yang terlayani proses pemenuhan persyaratan teknis PPLH	190	usaha/ kegiatan	60	usaha/ kegiatan	0	usaha/ kegiatan	0	usaha/ kegiatan	0%	0	usaha/ kegiatan	60	32%
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35	Dokumen	0	Dokumen	35	Dokumen	45	Dokumen	129%	129%	Dokumen	46	132%
2	1 1	6	2	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kegiatan Sosialisasi terhadap pelaku usaha/kegiatan	19	kegiatan	6	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	100%	-	kegiatan	6	32%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
		- Jumlah usaha/Kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	500 usaha/ kegiatan	140 usaha/ kegiatan	0 usaha/ kegiatan	0 usaha/ kegiatan	100%	-	usaha/ kegiatan	140	28%
		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	1	Laporan	**2**	200%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	25	%	5	%	2	%	2	%	100%	2%	%	7	28%
2	1 1	7	2		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega)	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	60%
2	1 1	7	2	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan	- Jumlah edukasi lingkungan	30	kegiatan	120	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0%	0	kegiatan	120	400%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
					Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
						- Jumlah titik pemantauan dan/atau pengawasan sosial	600	Titik	1200	Titik	0	Titik	0	Titik	0%	0	Titik	1.200	200%
						-Jumlah Sosialisasi Pengendalian Pencemaran lingkungan	8	Sosialisasi	8	Sosialisasi	0	Sosialisasi	0	Sosialisasi	0%	0	Sosialisasi	8	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	40%
2	**1 1**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Kampung Bedas**	**66,100**	**%**	**51,8%**	**%**	**17,8**	**%**	**55,4**	**%**	**311%**	**17,8**	**%**	**74**	**112%**

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	**1 1**	**8**	**2**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan**	**196**	**laporan**	**77**	**%**	**4**	**Laporan**	**4**	**Laporan**	**100%**	**4**	**Laporan**	**85**	**43%**
2	1 1	8	2	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-Jumlah Sosialisasi/ bimtek sekolah adiwiyata	15	sekolah	3	sekolah	3	sekolah	3	sekolah	100%	-	sekolah	6	40%
						-Jumlah laporan penilaian adiwiyata	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	-	Laporan	2	40%
						-Jumlah dukungan lintas sektor	10	Kegiatan	5	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%	-	Kegiatan	7	70%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	0	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	8	200%
2	**1 1**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kesesuaian data dan informasi adipura**	**75**	**%**	**70**	**%**	**71**	**%**	**72**	**%**	**101%**	**71**	**%**	**213**	284%
2	**1 1**	**9**	**2**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data Non Fisik Adipura**	**5**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**1**	**Dokumen**	**3**	60%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
2	11	9	2	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-Jumlah koordinasi Kegiatan adipura	1	kegiatan	1	kegiatan	0	kegiatan	0	kegiatan	0%	0	kegiatan	1	100%
						-Jumlah lokasi penilaian Adipura	40	lokasi	40	lokasi	40	lokasi	40	lokasi	100%	0	lokasi	80	200%
						Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40	entitas	0	entitas	0	entitas	0	entitas	0%	40	entitas	40	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	300%
2	11	10	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-Jumlah laporan penanganan pengaduan	5	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	80%
						-Jumlah laporan hasil penegakan hukum	5	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	80%
2	11	10	2	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	150	Pengaduan	70	Pengaduan	0	Pengaduan	0	Pengaduan	0%	0	Pengaduan	70	47%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	2	200%
						Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	220	Pengaduan	0	Pengaduan	0	Pengaduan	0	Pengaduan	0%	50	Pengaduan	50	23%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1 0	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	-Jumlah usaha/kegiatan yang diproses dalam rangka penegakan hukum (Sanksi administrasi, pidana dan perdata)	180	Perusahaan	40	Perusahaan	30	Perusahaan	30	Perusahaan	**100%**	0	Perusahaan	70	39%
						-Jumlah sertifikasi personill penegakan hukum	12	personil	6	personil	6	personil	6	personil	**100%**	-	personil	12	100%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	300%
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	99,69	%	74,93	%	80,93	%	81,09	%	100,2 %	87,15	%	243	244%
2	1 1	1 1	2		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah	31,66	%	24,39	%	26,08	%	30,41	%	117%	27,84	%	83	261%
						Persentase Pengurangan Volume Sampah	68,03	%	50,34	%	54,85	%	50,68	%	92%	59,31	%	160	236%
						Persentase Volume Sampah yang terkelola	99,69	%	74,73	%	0	%	0	%	0%	-	%	75	75%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1 1	2	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen Dokumen Lingkungan/ Kajian Pengelolaan Sampah	28	Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	**100%**	2	Dokumen	9	32%
2	1 1	1 1	2	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali	59400	ton	3600	ton	0	ton	0	ton	**0%**	0	ton	3.600	6%
						Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	**100%**	1	Laporan	2	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1 1	2	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD Baleendah	66780,7	ton/tahun	12780,14	ton/tahun	0	ton/tahun	0	ton/tahun	0%	-	ton/tahun	12.780	19%
						-Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD Ciparay	54657	ton/tahun	10355,4	ton/tahun	0	ton/tahun	0	ton/tahun	0%	-	ton/tahun	10.355	19%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
		-Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD Rancaekek	92441,9 ton/tahun	17912,38 ton/tahun	0 ton/tahun	0 ton/tahun	0%	-	ton/tahun	17.912	19%
		-Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD Soreang	88745,75 ton/tahun	17403,55 ton/tahun	0 ton/tahun	0 ton/tahun	0%	-	ton/tahun	17.404	20%
		-Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD URC	132787,45 ton/tahun	25981,49 ton/tahun	0 ton/tahun	0 ton/tahun	0%	-	ton/tahun	25.981	20%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah dan Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Jumlah tonase pengangkutan sampah per Tahun dari operasional UPTD Baleendah, UPTD Ciparay, UPTD Rancaekek, UPTD Soreang dan URC)	85584,96	Ton	0,00	Ton	85.584 ,96	Ton	144.4 46	Ton	**169%**	87.025	Ton	231.471	270%
2	1 1	1 1	2	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan persampahan	5000	peserta	200	Orang	1000	Peserta	1000	Peserta	**100%**	-	Peserta	1.200	24%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						-Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat untuk pengurangan sampah	250	unit	0	Unit	50	unit	50	unit	**100%**	-	unit	50	20%
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10	Kelompok	0	Kelompok	10	Kelompok	20	Kelompok	**200%**	20	Kelompok	40	400%
2	11	11	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan sampah dalam bentuk penanganan	7	Jenis	7	Jenis	0,00	Jenis	0,00	Jenis	**0%**	0,00	Jenis	7	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
					Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	40%
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	30	Unit	0	Unit	106	Unit	106	Unit	0%	8	Unit	114	380%
2	**1 1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-Nilai AKIP**	**78,25**	**Poin**	**81,05**	**Poin**	**77,5**	**Poin**	**84,1**	**Poin**	**109%**	**81,05**	**Poin**	**246**	**315%**

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						-Indeks Kepuasan Masyarakat	78,75	Poin	83,65	Poin	77,5	Poin	84,19	Poin	109%	83,65	Poin	251	319%
						-Persentase Aset dalam kondisi baik	94	%	92	%	92	%	93,08	%	101%	92	%	277	295%
2	**1 1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**300**	**300%**
2	1 1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	**100%**	2	Dokumen	8	80%
						-Jumlah Penyelenggaraan Forum PD	5	Kegiatan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	**0%**	0	Kegiatan	2	40%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	80%
2	1 1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	80%
2	1 1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	80%
2	1 1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	80%
2	1 1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diselesaikan secara tepat waktu	20	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	16	80%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan secara tepat waktu	21	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	**100%**	4	Dokumen	16	76%
2	**1 1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	300%
2	1 1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan	208	orang/ bulan	208	orang/ bulan	208	orang/ bulan	208	orang/ bulan	**100%**	208	orang/ bulan	624	300%
2	1 1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	**100%**	2	Dokumen	8	80%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	**1 1**	**1**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**300%**
2	1 1	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan evaluasi Pegawai	5	Kegiatan	2	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	**100%**	1	Kegiatan	4	80%
2	**1 1**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**300%**
2	1 1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang dibeli	10	Jenis	11	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	**0%**	0	Jenis	11	110%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	0,4
2	1 1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan alat tulis kantor yang dibeli	3	Jenis	45	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0%	0	Jenis	45	1500%
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	40%
2	1 1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	39	Jenis	39	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0%	0	Jenis	39	100%
2	1 1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	3	Jenis	7	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0%	0	Jenis	7	233%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	0	paket	1	paket	1	paket	**100%**	1	paket	2	40%
2	1 1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	2	Jenis	18	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	**#DIV/ 0!**	0	Jenis	18	900%
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	**100%**	1	Paket	2	40%
2	1 1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	5	Jenis	5	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	**0%**	0	Jenis	5	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	Dokumen	0	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	10	40%
2	1 1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	1750	Dus	350	Dus	0	Dus	0	Dus	0%	0	Dus	350	20%
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	Laporan	0	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100%	15	Laporan	30	40%
2	1 1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah	250	HOK	187	HOK	159	HOK	159	HOK	100%	20	Laporan	366	146%

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Laporan	0	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	**100%**	25	Laporan	50	40%
2	**1 1**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**300**	**300%**
2	1 1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	20000	buah	20000	buah	2000	Buah	2000	buah	**100%**	20000	buah	42.000	210%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	**100%**	5	Laporan	6	120%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	**100%**	12	Bulan	36	300%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	**100%**	12	Laporan	24	40%
2	1 1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Pegawai Non PNS	4488	Orang/ Bulan	4488	Orang/ Bulan	4488	Orang/ Bulan	4488	Orang/ Bulan	**100%**	4488	Orang/ Bulan	13.464	300%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391	Laporan	0	Laporan	368	Laporan	368	Laporan	**100%**	391	Laporan	759	194%
2	**1 1**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**94**	**Persen**	**92**	**Persen**	**92**	**persen**	**93,08**	**persen**	**101%**	**92**	**persen**	**277**	295%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan dan operasional yang dipelihara	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	**0%**	0	Unit	1	100%
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	**100%**	1	Unit	2	200%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	122	Unit	122	Unit	0	Unit	0	Unit	**0%**	0	Unit	122	100%
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122	Unit	0	Unit	122	Unit	122	Unit	**100%**	122	Unit	244	200%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/ diperbaiki	7	Jenis	7	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	**0%**	0	Jenis	7	100%
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	0	Unit	29	Unit	29	Unit	**100%**	29	Unit	58	200%
2	1 1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Paket	3	Paket	0	Paket	0	Paket	**0%**	0	Paket	3	100%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	**100%**	3	Unit	6	200%
2	1 1	1	2	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	**3**	Paket	**3**	Paket	**0**	Paket	**0**	Paket	**0%**	**0**	Paket	3	100%
2	**1 1**	**1**	**2**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan**	**3,12**	**Poin**	**3,08**	**Poin**	**3,09**	**Poin**	**3,44**	**Poin**	**111%**	**3**	**Poin**	**10**	309%

BANDUNG BEDAS!

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)= (7/6)	(9)		(10)=(5+7 +9)	(11)=(1 0/4)
2	1 1	1	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-Jumlah sampel pelayanan pengujian	2.744	Sampel	2.258	Sampel	0	Sampel	0	Sampel	0%	0	Sampel	2.258	82%
						-Jumlah pendapatan pelayanan	2.179.333.491	Rupiah	2.174.328.766	Rupiah	-	Rupiah	-	Rupiah	0%	-	Rupiah	2.174.328.766	100%
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	300%

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara umum mencapai 100% . Namun jika capaian kinerja tersebut dibandingkan terhadap target akhir Renstra maka capaian kinerja tersebut sebagian dibawah 100% dan sebagian telah mencapai 100%. Berikut ini merupakan uraian dari table diatas.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum, capaian kinerja untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ddditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra terdapat beberapa sub kegiatan. Berikut ini merupakan sub kegiatan dengan target akhir renstra belum mencapai 100% (karena ditargetkan mencapai 100% di tahun 2026).

Pada Sub Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota untuk indicator Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun capaian masih 0% hal tersebut dikarenakan indicator tersebut baru disesuaikan di tahun 2024. Selain itu masih trerdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian 0% di tahun 2023 hal tersebut dikarenakan indicator kinerja yang dimaksud sudah tidak digunakan.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Capaian kinerja untuk tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk setiap sub kegiatan telah ditetapkan. Terdapat beberapa program kegiatan dengan beberapa indikator kinerja. Berikut ini merupakan sub kegiatan dengan capaian kinerja telah melebihi 100%.

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
-

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara umum, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 mencapai 100%. Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra terdapat beberapa yang belum mencapai 100% dan melebihi target (>100%).

Secara umum, faktor yang menyebabkan belum mencapai 100% terhadap target akhir renstra dikarenakan capaian 100% ditargetkan tercapai di tahun 2026. Sedangkan

untuk capaian kinerja yang melebihi target >100% hal tersebut secara umum dikarenakan pada saat penentuan target akhir Renstra bukan merupakan hitunggan gabungan. Sedangkan pada table yang termuat diatas, capaian kinerja dari 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan nilai akumulasi. Berikut contoh dari perbedaan penentuan target di akhir Renstra.

1) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja Persentase ketersediaan alat uji terhadap parameter baku mutu di tahun 2023 mencapai 115% terhadap target akhir Renstra. Target yang ditetapkan pada renstra di Tahun 2026 adalah 80% sedangkan pada table (sesuai dengan PMDN 86 Tahun 2017) Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah gabungan capaian tahun 2021-2023. Tahun 2021 mencapai 52%, Tahun 2022 mencapai 40% dan tahun 2023 tiidak dilakukan perhitungan (perubahan indicator kiinerja). Sehingga di tahun 2023 capaian kinerja sebesar 92% atau 115 % terhadap Target akhir Renstra (80%). Adanya perbedaan proses perhitungan diakhir tahun Renstra.
2) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indicator kinerja Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang dibeli mencapai 220%. Pada Renstra ditetapkan 10 jenis komponen diakhir tahun capaian kinerja. Sedangkan di tahun 2021 sudah terealisasi 11 jenis dan tahun 2022 sebanyak 10 jenis. Sehing1 ga jika diakumulasikan dari tahun 2021-2022 maka realisasi di tahun 2023 sudah mencapai 21 jenis. Sedangkan pada capaian akhir renstra ditargetkan 11 jenis.
3) Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indicator kinerja Jumlah pendapatan pelayanan mencapai 292% dan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mencapai 300%. Untuk indicator jumlah pendapatan, realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra sudah terlampaui. Sedangkan untuk indicator jumlah unit BLUD sama hal nya dengan sub kegiatan sebelumnya, adanya perbedaan penentuan/perhitungan target akhir.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah;

Secara umum, target indicator kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun untuk beberapa target yang telah melampaui target Renstra, untuk dipertimbangkan penentuan target indicator kinerja.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Alokasi anggaran dilakukan untuk pemenuhan terhadap belanja yang bersifat wajib mengikat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan langkah nyata dengan berbagai inovasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Liingkunggan Hidup sehingga dapat berjalan lebih optimal.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH KABUPATEN BANDUNG

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

NO	Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD	Target NSPK/ SPM Tahun 2022	Target IKK Tahun 2022	Target SDGs Tahun 2023	Target Renstra perangkat derah tahun ke-				Realisasi capaian tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,22	53,29		56,03	56,04	56,05	56,06	56,03	56,58	56,05	56,06	Proyeksi Nilai IKLH Tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan RPJMD Perubahan (Perda Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang perubahan RPJMD)
2	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup				97,60%	98,30%	98,90%	99%	102,60%	105,42	98,90%	99,40%	Capaian kinerja telah mencapai 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga nilai proyeksi menggunakan nilai capaian di tahun 2022

NO	Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD	Target NSPK/ SPM Tahun 2022	Target IKK Tahun 2022	Target SDGs Tahun 2023	Target Renstra perangkat derah tahun ke-				Realisasi capaian tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3	Persentase Volume Sampah yang Terkelola				77,73%	80,93%	87,14%	93%	74,93%	81,09%	87,15%	93,42%	
4	Nilai AKIP				77,5	77,5	77,75	78	81,05	84,10	84,10	84,10	Capaian kinerja di tahun 2023 telah melebiihi target yang telah ditetapkan sehingga proyeksi dicantumkan berdasarkan data capaian tahun 2022
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			77,5	77,75	78	78,25	83,65	84,19	84,19	84,19	Capaian kinerja di tahun 2023 telah melebiihi target yang telah ditetapkan sehingga proyeksi dicantumkan berdasarkan data capaian tahun 2023
6	Prosentase Aset dalam Kondisi Baik	-			92%	92%	92%	93%	92%	93,08%	93,08%	93,08%	

NO	Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD	Target NSPK/ SPM Tahun 2022	Target IKK Tahun 2022	Target SDGs Tahun 2023	Target Renstra perangkat derah tahun ke-				Realisasi capaian tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-		Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	NA	NA	NA	NA	32	35	NA	NA	Satuan Poin
8	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.			Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	NA	NA	NA	NA	41,12%	NA	NA	NA	
9	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	3600	3600	3600	3600	192.586,25	2506	3600	3600	Satuan Ton/Tahun
10	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.			Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	NA	NA	NA	NA	13,33%	NA	NA	NA	

Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, dilakukan dengan mempertimbangkan kebikan Nasional yang lebih diarahkan pada pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat, kebijakan penanggulangan Covid-19, kerangka waktu dan kemampuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2023 serta pendapatan dan ketersedian Anggaran daerah. Adapun capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 meliputi:

2.2.1. Indikator kinerja meningkatnya kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase ketercapaian sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Pada IKLH terdapat 3 komponen perhitungannya, yaitu IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKL (Indeks Kualitas Lahan). Capaian kinerja IKLH dan persentase ketercapaian sasaran Pembangunan bidang lingkungan hidup adalah:

- Meningkatnya persentase ketercapaian sasaran Pembangunan bidang lingkungan hidup dari target 98,30% sebesar 5,33% atau realisasi 103,63%;
- IKLH meningkat 2,9 poin, yaitu dari target 53,68 poin atau realisasi 56,58 poin;

2.2.2. Indikator kinerja pengelolaan sampah dengan sasaran meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah adalah persentase volume danoah yang terkelola yang berasal dari penjumlahan dari indicator kinerja persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah.

- Persentase sampah yang terkelola Tahun 2023 adalah 81,09% meningkat 0,16% dari target yang ditetapkan sebesar 80,93%.
- Pada penanganan sampah terjadi peningkatan capaian sebesar 4,33% yaitu dari target 26,08% terealisasi 30,41%. Sedangkan pada capaian persentase pengurangan sampah terjadi penurunan 4,17% dari target 54,85% terealisasi 50,68%.

Capaian meningkatnya kinerja pengelolaan sampah didukung dengan adanya penambahan armada pengangkut sampah, optimalisasi kinerja operasional TPST Cicukang, penguatan penanganan sampah berbasis rumah tangga melalui bimtek peningkatan kapasitas pengelola sampah, Bimtek optimalisasi peran TPS3R, Bimtek pengelolaan sampah pada pilar desa (Kades, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Ketua RW) , operasinal KBBB (Kader Bandung Bedas Bersih Sampah), pemberian hibah sarana prasarana pengumpul, pengadaan mesin pengolah sampah dengan sistem RDF, dan pembangunan Bank Sampah Tematik.

2.2.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja capaian nilai AKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Aset Dalam Kondisi Baik. • Capaian nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah 84,10 poin dari target yang ditetapkan poin

77,5 Poin atau meningkat 6,6 poin dengan capaian kinerja 108,52%. Untuk indikator persentase Aset Dalam Kondisi Baik dari target yang ditetapkan sebesar 92% dan terealisasi sebesar 93,08 % atau capaian kinerja sebesar 101,17%. Sedangkan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dari target yang ditetapkan pada 77,75 poin terealisasi 84,19 poin atau meningkat sebesar 6,44 point dengan capaian kinerja 108,28%.

Capaian meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat didukung dengan adanya sarana dan prasarana pelayanan yang lengkap dan tersedia dengan baik, tersedianya sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, pelaksana pelayanan yang berperilaku baik dan memiliki kompetensi, persyaratan layanan yang sudah jelas dan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Meningkatnya Nilai AKIP didukung dengan tersedianya dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, Renja, DPA, DPPA, perjanjian kinerja dan Renaksi yang mendukung kinerja dengan kualitas dokumen yang telah memenuhi standar, telah diformalkan, dan telah dipublikasikan, serta telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, adanya sistem aplikasi yang memudahkan penyusunan dokumen perencanaan, pengukura dan pelaporan kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh DLH (seperti SIAKANG, SIDALMONEV, SASIKAP EVO, dll) serta adanya reward dan punishment atas capaian kinerja bagi pegawai .
- Meningkatnya capaian kinerja persentase aset dalam kondisi baik didukung oleh adanya pembelian peralatan dan mesin baru, penambahan gedung dan bangunan serta adanya penghapusan/pemindahtanganan aset ke pihak lain. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan diantaranya :
    - Masih rendahnya kualitas SDM : melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan lingkungan;
    - Ketersediaan data dan informasi kualitas lingkungan belum memadai : pemanfaatan laboratorium lingkungan untuk menunjang pelaksanaan pemantauan lingkungan, pengendalian dan penegakan hukum lingkungan;
    - Keterbatasan anggaran, SDM serta sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan: memanfaatkan peluang kerjasama dalam pengendalian pencemaran lingkungan dari stake holder lain seperti LSM dan lembaga penelitian, adanya kerjasama kemitraan dengan Perhutani dan PTPN VIII serta tersedianya komunitas dan badega lingkungan yang aktif terlibat dalam pengendalian pencemaran dan penanaman/pemeliharaan pohon
    - Luas wilayah yang cukup besar serta topografi yang berbukit menyebabkan sulitnya pelayanan pengangkutan sampah :

pembentukan kelompok masyarakat pengelola Bank Sampah Tematik dan TPS3R, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di setiap desa yang mendorong terbentuknya pengelolaan sampah mandiri, serta dengan pendekatan kebijaka berupa peraturan daerah, peraturan bupati, instruksi bupati maupun surat edaran.

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 berada pada persentase capaian diatas 100% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dinyatakan sangat baik dengan eEfisiensi sumber daya atau capaian kinerja dibandingkan terhadap penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

- untuk tujuan meningkatnya kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan (indikator kinerja IKLH) adalah 6,59%;
- untuk tujuan meningkatnya kinerja pengelolaan sampah (indikator persentase volume sampah yang terkelola) adalah 2,58% ;
- untuk sasaran meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup (indikator Nilai AKIP, IKM dan Persentase BMD dalam kondisi baik) adalah (9,18%+11,38%+2,22%)/3 = 7,59%.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH KABUPATEN BANDUNG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penyesuaian jabatan. Adapun penyesuaian jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup termuat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup, maka terbitlah Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup termuat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun pada tahun 202. Berikut ini merupakan Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan DIKPLHD yang disusun tahun 2021, terdapat isu-isu yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut ini merupakan isu-isu tersebut.

a. Isu tata Guna Lahan;

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam merespon isu tata guna lahan ini dapat terlihat dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) Kabupaten Bandung tahun 2021 menjadi 49,28.

Dalam pencapaian meningkatnya nilai IKTL terdapat hal-hal kritis yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut, diantaranya :

- Peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi memicu masyarakat melakukan alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhannya.
- Perambahan dan kebakaran hutan serta pengolahan tanah yang tidak mengindahkan kaidah konservasi lahan menyebabkan kerusakan hutan dan lahan kritis.
- Kerusakan hutan menyebabkan daya dukung hutan menjadi berkurang. Adanya 11.690 Ha Hutan kritis dan sangat kritis menambah run off sebesar 58,49 juta m3/tahun atau 2 m3/detik yang setara dengan kebutuhan air bersih 1,7 juta jiwa penduduk dengan asumsi kebutuhan air 150 liter/orang/hari
- Rusaknya 11.690 Ha hutan menyebabkan ada kehilangan potensi penyerapan CO2 sebesar 9.005,5 Ton/hari yang setara dengan supply Oksigen sebanyak 639,17 Ton/hari (setara kebutuhan oksigen 6,8 juta jiwa).

b. Isu Kualitas Air;

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam merespon isu Kualitas Air ini dapat terlihat dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bandung tahun 2021 menjadi 32.00 poin sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya 29,67 poin.

Dalam pencapaian meningkatnya nilai IKA terdapat hal-hal kritis yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.

- Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kemiskinan berimplikasi pada munculnya pemukiman kumuh yang berkontribusi pada pencemaran air. Jumlah keluarga miskin tahun 2021

mencapai 109.924 KK (10,28%). Keluarga miskin menjadi pemicu isu lingkungan lainnya;

- Tingginya jumlah penduduk (3.633.437 jiwa) serta permukiman tanpa sanitasi aman (13,99%), berpotensi menambah beban pencemar domestic;
- Tahun 2021 debit air limbah yang dihasilkan industri IPAL Cisirung jauh lebih besar dibandingkan Debit MoU dan IPLC sehingga menambah beban pencemaran sungai;
- Penggunaan pupuk dan insektisida pada pertanian serta kegiatan pemeliharaan ternak dan unggas berpotensi mencemari badan air penerima / sungai.Beban pencemar dari peternakan mencapai 32.805 Ton BOD/tahun dan 65.947,6 ton /tahun masing-masing dari ternak besar dan unggas.

c. Isu Kualitas Udara;

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam merespon isu Kualitas Udara ini dapat terlihat dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bandung tahun 2021 menjadi 78,9 poin.

Dalam pencapaian meningkatnya nilai IKU terdapat hal-hal kritis yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.

- Pemakaian bahan bakar untuk kegiatan industri, transportasi baik menggunakan solar maupun bensin, rumah tangga dan pembakaran sampah, akan mengemisikan pencemar udara antara lain NOx, Sox, TSP, PM10, gas rumah kaca, dll;
- Peningkatan jumlah kendaraan meningkatkan GRK (CO2) ke udara yang berdampak pada pemanasan global penyebab perubahan iklim. Kendaraan roda 2 penyumbang GRK terbesar di antara jenis kendaraan yang ada dan memiliki tren positif dari waktu-kewaktu;
- Kontribusi GRK tahun 2021 terbesar berasal dari transportasi dibandingkan industri dan rumah tangga;
- Kemacetan menyumbang emisi Pencemar udara. Dari 31 ruas jalan yang dipantau tahun 2021, Jl .Sayuran memiliki daya dukung hampir terlampaui dengan nilai V/C = 0,83.

d. Isu Resiko Kebencanaan / Banjir;

Isu resiko kebencanaan/Banjir tidak secara langsung menjadi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Namun isu resiko ini berkaitan dengan Isu Prioritas Masih Luasnya Lahan Kritis dan Isu Masih Rendahnya Tingkat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung. Isu masih luasnya lahan kritis ini berkaitan dengan IKTL. Nilai IKTL Kabupaten Bandung meningkat menjadi 49, poin. Sedangkan untuk isu pengelolaan sampah dapat dilihat

pada capaian kinerja dengan indicator Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Tahun 2021 sebesar 62,4%.

Dalam pencapaian kinerja terkait isu resiko kebencanaan/banjir terdapat hal-hal kritis yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.

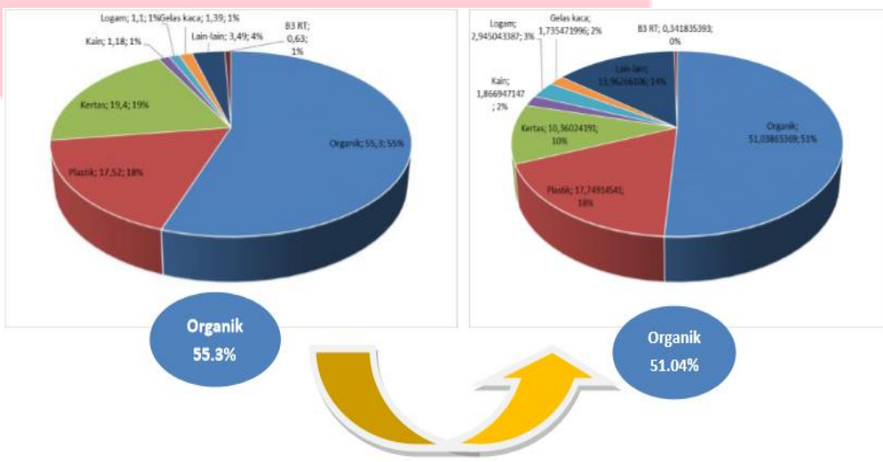
- Luasnya lahan kritis dan curah hujan yang tinggi akan meningkatkan laju erosi dan sedimentasi. Lebih lanjut, kapasitas anak sungai dan Sungai Citarum dalam menampung air larian berkurang sehingga air sungai meluap dan menyebabkan genangan dan banjir. Penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang massive juga menyebabkan lahan menjadi potensial tergenang/ banjir saat hujan. Banjir tahun 2021 meliputi 22 kecamatan dengan 111 kejadian;
- Banjir yang terjadi di perkotaan disebabkan oleh kurang/rusaknya saluran drainase, banyaknya sampah di sungai / saluran yang menghambat aliran.

e. Isu Perkotaan / Persampahan;

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam merespon isu Perkotaan/Persampahan ini dapat terlihat dengan meningkatnya Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Tahun 2021 sebesar 62,4%.

Dalam pencapaian meningkatnya Persentase Pengelolaan Sampah terdapat hal-hal kritis yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.

- Peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan warga akan meningkatkan Timbulan Sampah dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengubah komposisi timbulan sampah;



Gambar 2.1

Komposisi timbulan sampah

- Tahun 2017 persentase sampah organik menurun dibandingkan pengukuran periode tahun 2007. Ini akan mempengaruhi beban pengelolaan sampah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana persampahan akan menjadi tekanan bagi lingkungan karena banyaknya sampah tak terkelola. Tingkat kecukupan armada baru 15,55%,

f. Isu Tata Kelola.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam merespon isu Tata Kelola ini dapat terlihat pada Anggaran Pengelolaan Lingkungan, PDRB/ PAD Kab.Bandung, Perusahaan Yang mendapat ijin mengelola limbah.

Anggaran Pengelolaan Lingkungan yang termuat dalam Dokumen IKPLHD merupakan pengelolaan Lingkungan Hidup se-Kabupaten Bandung , tidak hanya DLH tetapi juga anggaran pada Disperkimtan dan Kecamatan.

Dalam merespon isu tersebut, anggaran pengelolaan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tingkat akuntabilitas kinerja atau nilai AKIP. Tahun 2021, nilai Dinas Lingkungan Hidup adalah 78,66 atau berpredikat baik. Sedangkan terkait dengan Perusahaan Yang mendapat ijin mengelola limbah terlihat dalam program pengawasan terhadap industri terdapat 61,6% industri yang taat dan jumlah ini meningkat 4% dibandingkan tahun 2020

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

a. Isu Tata Guna Lahan

Permasalahan terkait isu tata guna lahan yaitu adanya alih fungsi lahan dan Perusakan lahan hutan.

Kebutuhan permukiman yang tinggi yang dipicu oleh semakin banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan ruang untuk bermukim semakin besar. Ketentuan tentang perumahan, permukiman mengacu kepada UndangUndang No 1 tahun 2011. Dalam undang-undang No.1 Tahun 2011 pasal 1 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan, perbaikan, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.

Kebijakan umum pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk :

- Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;

- Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk kebutuhan pemenuhan rumah, perumahan, permukiman serta lingkungan hunian perkotaan dan Perdesaan.

Berdasarkan klasifikasi topografinya, luas wilayah Kabupaten Bandung dengan kemiringan lereng 0-2% sebesar 295,01 Ha, 2-15% sebesar 65.501,09 Ha, 15-25% sebesar 33.146,28 Ha, 25-40% sebesar 42.997,79 Ha dan > 40% adalah sebesar 32.144,18 Ha. Wilayah dataran Kabupaten Bandung juga menjadi wilayah bencana banjir, sehingga makin terbataslah ruang yang aman untuk permukiman.

Kebutuhan penduduk akan lahan permukiman di perkotaan memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian (lahan basah di wilayah dataran) yang berada di perkotaan menjadi lahan permukiman sehingga luas lahan sawah menjadi berkurang. Migrasi penduduk, keterbatasan lahan dataran di perkotaan, harga tanah yang mahal, dan keterbatasan ekonomi, menjadi alasan penduduk mencari lahan permukiman di lokasi dengan kontur lebih tinggi. Oleh karenanya terjadilah alih fungsi lahan perkebunan / hutan di lokasi yang lebih tinggi elevasinya yang biasanya menjadi lahan perkebunan/hutan, menjadi peruntukan lain (permukiman / usaha).

Berikut ini merupakan alih fungsi lahan di kabupaten Bandung.

- Alih Fungsi Lahan Sawah dan perkebunan;
- Alih Fungsi Lahan Hutan
- Alih Fungsi Lahan menjadi Lahan Non Pertanian (permukiman)
- Alih Fungsi lahan Menjadi Lahan Pertambangan dan Eksploitasi Panas Bumi

Selain alih fungsi lahan, terjadi pula perusakan lahan hutan. Kawasan hutan lindung pada dasarnya memiliki luasan yang tetap. Namun pada kenyataannya, secara fisik mengalami kerusakan-kerusakan sehingga tidak lagi bervegetasi dengan akar-akar pohon yang kokoh. Berdasarkan data dari BKSDA, Cagar Alam Gunung Tilu yang luasnya 8.000 Ha (berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/Um/2/1978) dari tahun ke tahun terus mengalami perambahan hutan dan occupasi. Perambahan ini terjadi di Blok Guludug dan sekitarnya yang berada di desa Sugihmukti Kecamatan Pasir Jambu dan di Blok Batu Belang yang berada di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan juga di Blok Cihideung. Sehingga melalui SK Menteri Kehutanan No SK.1873/MENHUT-VII/KUH/2014 Kawasan hutan Gunung Tilu ditetapkan sebagai cagar alam seluas 7.479,80 Ha. Pada tahun 2021, dari 7.479 Ha luas cagar alam, sekitar 250 Ha telah beralih fungsi menjadi perkebunan semusim dan beberapa permukiman penduduk yang dihuni oleh petani penggarap.

Sementara itu TWA/CA Patenggang yang luasnya 154 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/Kpts/Um/6/1978, telah mengalami okupasi (konversi menjadi pemukiman liar). Pada tahun 2015 okupasi terjadi di

TWA/CA Patenggang seluas 1,8 Ha (105 rumah) setelah tahun 2014 terjadi okupasi seluas kurang lebih 1,6 Ha. Rumah permanen, non permanen dan tidak bersertifikat banyak berdiri dimana masyarakat hendak menguasai lahan dan tidak mau pindah. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 5963/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 pada tahun 2017 Kawasan Hutan Talaga Patengan ditetapkan menjadi Cagar Alam dengan luas 121.242 Ha (yang merupakan gabungan dari CA Patengan I dan CA Patengan II).

Perambahan hutan (permukiman dalam kawasan hutan sampai tahun 2021 seluas 13.133,75 Ha yang terdiri dari 444 KK dan 155 bangunan), serta 1 Ha hutan yang dirambah di tahun 2021.

Selain hutan konservasi, hutan lindung yang berada di bawah pengelolaan Perhutani KPH Bandung Selatan pun mengalami perambahan. Pada tahun 2016 tercatat perambahan menyebabkan kondisi kritis mencapai 9.627,25 Ha hutan lindung dan 351,02 Ha Hutan Produksi, serta kondisi sangat kritis mencapai 4.737,59 Ha hutan lindung dan 221,46 Ha hutan produksi. Di tahun 2019, luas lahan kritis berkurang menjadi 1.262 Ha di hutan lindung akibat perambahan hutan dan Kecamatan Kecamatan Kertasari memiliki hutan kritis paling luas mencapai 719,79 Ha. Dan di tahun 2020 lahan hutan kritis masih ada seluas 5.774,92 Ha dan sangat kritis 174 Ha.

Pada tahun 2021 hutan lindung yang dirambah di KPH Bandung Utara seluas 1 Ha dan di hutan konservasi 1 Ha.

Semua jenis kerusakan dan perusakan lahan / hutan tersebut menyebabkan lahan kritis dan degradasi tanah sehingga fungsi hutan menjadi berkurang dari semestinya, sehingga mengakibatkan kapasitas jasa ekosistem hutan yang bisa diberikan bagi penduduk menjadi menurun.

b. Isu Kualitas Air

Permasalahan terkait isu kualitas air adalah adanya pencemaran Anak Sungai Citarum.

Pencemaran Air Anak sungai Citarum telah menjadi isu lingkungan di Kabupaten Bandung selama beberapa waktu. Pencemaran air anak Sungai Citarum sangat berkaitan dengan isu lingkungan lain terutama isu Lahan Kritis dan Tingkat Pengelolaan Sampah yang masih Rendah. Luasnya lahan kritis di Kabupaten Bandung terutama di perbukitan / dataran tinggi, telah berdampak pada tingginya erosi tanah yang berefek pada sedimentasi sungai yang tinggi. Di musim penghujan sedimen ini akan meningkatkan konsentrasi zat padat tersuspensi dalam air sungai yang akan memperburuk kualitas air. Di sisi lain akibat tingginya sedimentasi akan meningkatkan potensi banjir akibat kapasitas sungai yang menyempit. Kesadaran masyarakat akan kebersihan yang kurang serta kurangnya sarana prasarana persampahan membuat banyak sampah belum terkelola dan sebagian mengotori sungai. Banyaknya sampah di sungai

akan meningkatkan beban pencemar akibat terurainya senyawa penyusun sampah sehingga meningkatkan beban pencemar dalam perairan. Materi sampahnya sendiri akan mengganggu kehidupan perairan sehingga mengakibatkan matinya ikan dan mahluk hidup aquatic lainnya.

Selain itu, adanya hambatan dalam meningkatkan kualitas air adalah Pemukiman kumuh yang berkontribusi pada perilaku hidup kurang sehat, Akses sanitasi aman masih kurang, Keterbatasan penyediaan air bersih penduduk, Pengelolaan air limbah domestik belum optimal, Pencemaran oleh air limbah Industri dan Pencemaran limbah pertanian dan Limbah peternakan.

c. Isu Kualitas Udara

Isu Kualitas udara adalah isu yang berkaitan dengan Target 11.6 SDG's yaitu untuk mengurangi kematian yang diakibatkan dari paparan polusi udara terutama di daerah perkotaan. Dari beberapa literatur dikatakan bahwa pencemar udara merupakan penyebab kematian global baik akibat o u tdoor p olu tion maupun indoor pollution (WHA, 2017). Di Kabupaten Bandung isu Kualitas udara sangat berkaitan dengan Isu lingkungan prioritas seperti Masih Luasnya Lahan Kritis (isu Tata guna lahan) dan Isu Prioritas Masih Rendahnya Tingkat Pengelolaan Sampah (isu perkotaan/persampahan). Pencemar udara dan gas rumah kaca yang dihasilkan berbagai kegiatan di Kabupaten Bandung seperti aktivitas industri, transportasi dan rumah tangga, dan pembakaran sampah akan diserap oleh pohon-pohon yang ada di RTH maupun pohon di hutan. Oleh karenanya hutan gundul dan lahan kritis tanpa vegetasi akan mengurangi kapasitas penyerapan pencemar udara tersebut. Sementara itu pembakaran sampah dan pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan meningkatkan gas rumah kaca yang merupakan bagian dari pencemaran udara. Upaya-upaya yang dilakukan untuk merespon isu masih luasnya lahan kritis dan masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah menjadi bagian dari upaya merespon isu kualitas udara pula. Parameter yang dibahas dalam Isu Kualitas Udara selain keberadaan pencemar SO2, NOx dan lain lain sesuai dengan baku mutu udara ambien sesuai PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Lampiran VII, juga menyangkut Gas Rumah Kaca penyebab Pemanasan Global terutama CO2, yang mengakibatkan Perubahan iklim. Pembahasan Sumber Pencemar udara / GRK berkaitan dengan konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh Industri, Kendaraan Bermotor dan rumah Tangga. Sektor lain yang juga berkontribusi menghasilkan Gas rumah Kaca adalah pertanian dalam hal pemakaian pupuk urea, peternakan akibat kotoran ternak maupun proses pencernakan hewan ternak, serta pembakaran sampah. Sementara responnya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah peningkatan luas dan penataan RTH, pembuatan tamantaman kota dan taman kehati, program

penanaman dan pemeliharaan pohon, pengomposan kotoran hewan bersinergi dengan upaya pengendalian pencemaran air dari peternakan serta pengolahan sampah.

Adapun hambatan dalam peningkatan kualitas udara adalah Pemakaian Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga, Pemakaian Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Keterbatasan Kapasitas Jalan dan Tingginya Emisi gas Rumah Kaca.

d. Isu Resiko Kebencanaan/Banjir

Resiko Bencana / Banjir sangat berkaitan dengan isu tata Guna Lahan, Perubahan fungsi lahan menjadi lahan terkedapkan akan mengurangi koefisien infiltrasi dan meningkatkan koefisien run off air hujan, Perubahan lahan hutan menjadi pertanian yang tak berwawasan lingkungan pun menyebabkan lahan tanah terdegradasi dan menjadi kritis serta mudah tererosi, sehingga menyebabkan tingginya sedimentasi di perairan / sungai, Akibat dimensi sungai yang menyempit menjadikan kapasitas tampung sungai mengecil, sedangkan volume run off semakin besar menyebabkan air sungai meluap menyebabkan banjir, Banjir diperparah oleh banyaknya sampah di sungai akibat tak terkelola maupun karena dibuang sembarangan oleh masyarakat, Sampah yang dibuang ke sungai akan menambah sedimentasi dan menghambat aliran air sungai, Perubahan fungsi saluran irigasi pertanian menjadi saluran drainase di perkotaan, memaksa saluran drainase dengan dimensi lebih kecil di hilir harus menampung debit air hujan yang semakin besar di hilir sehingga kapasitas saluran drainase tidak memenuhi, hingga terjadi luapan saluran, genangan dan banjir di beberapa lokasi di Kabupaten Bandung, Upaya-upaya solutif isu banjir di Kabupaten Bandung telah dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta msyarakat, Namun karena isu banjir merupakan isu regional yang meibatkan berbagai stakeholder dan lintas administrasi, maka perlu upaya-upaya sinergi yang terkoordinasi.

Permasalahan banjir pada musim penghujan di Kabupaten Bandung terutama berasal dari Sungai Citarum Hulu dan anak-anak sungainya, yaitu di wilayah yang terletak di sekitar bantaran Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Bandung tahun 2016-2036, wilayah yang rawan terjadi bencana banjir meliputi 10 kecamatan dengan perkiraan luas mencapai 7.975,41 Ha atau sekitar 15,09% dari luas wilayah Kabupaten Bandung (Tabel 44a) (lampiran). Berdasarkan data dari BPBD, wilayah Kabupaten Bandung yang rutin mengalami kejadian banjir terutama terdapat di 6 lokasi kecamatan, baik yang berasal dari banjir Sungai Citarum maupun banjir yang berasal dari anak Sungai Citarum yaitu Kecamatan Banjaran, Bojongsoang, Pangalengan. Dayeuhkolot, Baleendah dan Kecamatan Majalaya.

Banjir yang berasal dari Sungai Citarum hulu terutama menggenangi sebagian besar Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Ciparay, dan Kecamatan Majalaya. Sedangkan banjir yang berasal dari anak Sungai Citarum. yaitu :

- Sungai Citarik mengakibatkan tergenangnya sebagian wilayah Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk
- Sungai Cikeruh menggenangi sebagian Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Rancaekek
- Sungai Cisangkuy mengakibatkan genangan banjir di sebagian wilayah Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Baleendah

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung (Bappelitbangda) adalah pada :

- Daerah di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu/sub DAS Citarum Hulu, dengan muara-muara anak sungainya yang sering menyebabkan banjir, antara lain Sungai Ciganitri, Sungai Citarik, dan Sungai Cipamokoloan. Luas kawasan yang terkena genangan banjir rutin adalah 1.700 Ha (DLH. 2021)
- Sungai yang alirannya melalui jalan, antara lain Sungai Cipamokolan dan Sungai Ciendog (Desa Babakan Sayang). Sungai-sungai Citarum bermuara di Sungai Citarik yang selajutnya menuju arah Sungai Citarum di Desa Sapan, Oleh karena itu setiap tahun Desa Sapan mengalami banjir.
- Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan dan air kembali ke lokasi jalan tol serta menggenang di sisi kanan-kiri badan jalan. Daerah lainnya yang memiliki potensi banjir secara temporer adalah Kecamatan Margahayu, Cileunyi, Katapang, Soreang, dan Kecamatan Margaasih
- Kawasan rawan bencana banjir lainnya adalah : Kecamatan Bojongsoang, Rancabali, Ciparay dan Majalaya. dimana banjir erat kaitannya dengan sistem drainase yang tidak dikelola dengan baik (DLH. 2021)

Berdasarkan data dari BPBD Kab. Bandung, hingga akhir tahun 2016 banjir telah menggenangi 20 kecamatan di Kabupaten Bandung. Luas area yang tergenang mencapai 177,22 Ha. Jumlah kecamatan yang tergenang pada tahun 2016 lebih banyak daripada tahun 2015 yang meliputi 11 kecamatan. Sementara itu bencana banjir tahun 2017 telah menggenangi 17 kecamatan dengan perkiraan pengungsi berjumlah 1.353 jiwa dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp.4.589.743.040. Pada tahun 2018 kejadian banjir menggenangi 8 kecamatan dengan luas area mencapai 4.184,5 Ha.



Gambar 2.2

Banjir di Kabupaten Bandung

Adapun yang menjadi hambatan dalam merespon isu resiko bencana/banjir adalah Tingkat Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Masih rendah, adanya Aktivitas Permukiman di Bantaran Sungai, Laju Erosi dan Sedimentasi Yang Tinggi, Pengambilan air tanah tak terkendali menyebabkan Penurunan Permukaan Tanah, Penurunan Muka Air Tanah, Land Subsident di Kabupaten Bandung, Peresapan Air dan Sistem Drainase Tidak Memadai.

e. Isu Perkotaan/Persampahan

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan timbulan sampah meningkat, sementara sarana prasarana pengelolaan sampah terbatas. Hal ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Bandung dan kabupaten / kota yang lain saat ini yaitu sampah yang tidak terkelola. Isu persampahan ini sangat berkait dengan isu lingkungan lainnya, seperti tata guna lahan (menyangkut keterbatasan lahan untuk dapat dijadikan TPA), isu kualitas udara (akibat bau yang ditimbulkan, pencemar udara yang dikeluarkan ketika dibakar), isu kualitas air (akibat air lindinya / leachate) yang tidak terkelola sehingga mengalir dan meresap ke dalam tanah), juga isu banjir (akibat banyaknya sampah yang dibuang ke sungai sehingga menyumbat aliran dan meningkatkan sedimentasi sehingga kapasitas tampung sungai berkurang).

Sumber, jenis dan komposisi sampah yang ditimbulkan dipengaruhi oleh tingkat social ekonomi masyarakat dan kondisi alamnya. Semakin maju tingkat ekonomi dan budaya masyarakat maka semakin kompleks pula pengelolaan sampah yang harus dilakukan. Perilaku dan kesadaran masyarakat serta keterbatasan pelayanan pembuangan sampah membuat sebagian toko, bengkel, rumah tangga, hotel, perkantoran dan sumber sampah lainnya melakukan pembuangan sampah pada tempat-tempat yang tidak semestinya seperti sungai, lahan-lahan kosong, di pinggir jalan dan sebagainya. Kejadian ini membuat kondisi yang tidak nyaman dan tidak sehat. Inilah salah satu bentuk masalah yang ditimbulkan apabila penanganannya terlambat dan tidak sistematis dalam pengelolaan sampah.

Adapun hambatan dalam merespon isu perkotaan/persampahan adalah Peningkatan Timbulan Sampah, Rendahnya kesadaran masyarakat,

Keterbatasan Sarana prasarana persampahan dan Tidak terdapat TPA aktif di Kabupaten Bandung karena TPA Babakan ditutup.

f. Isu Tata Kelola

United Nation Development Program (UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.

Sementara itu, bank dunia lebih melihat tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi. Dalam definisinya, dikatakan bahwa suatu negara telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan. Termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. Good governance juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik. Berdasarkan definisi di atas, setidaknya good governance memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:

- Transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.
- Partisipasi (inklusifitas), adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang

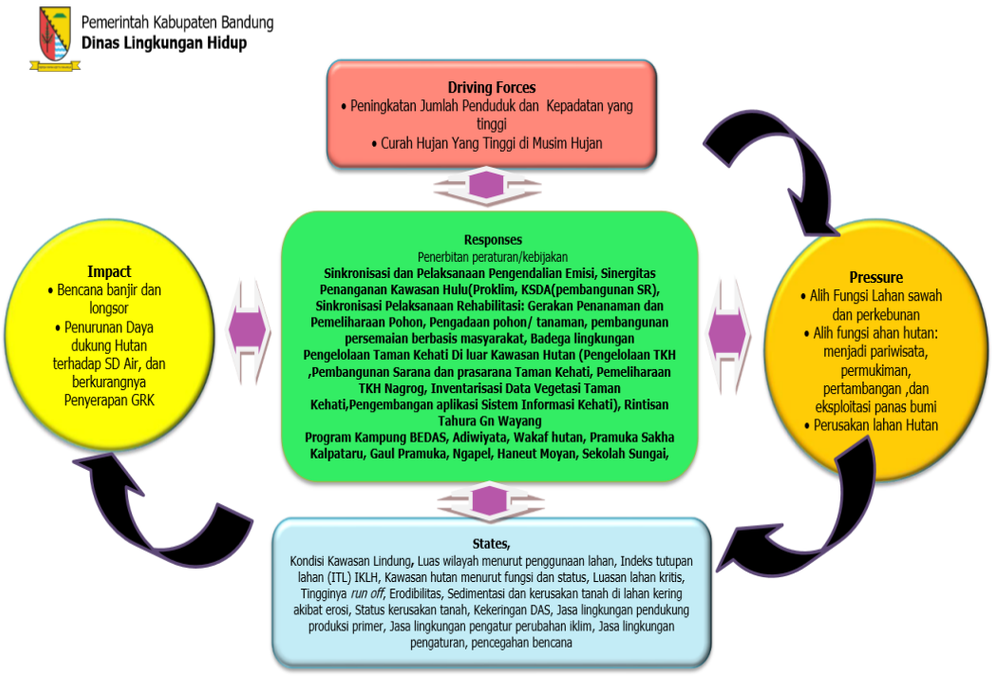
relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

- Akuntabilitas adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (access to justice) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.
- Koordinasi adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya. Terdapat berberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola di sektor kehutanan.

Adapun yang menjadi hambatan dalam merespon isu tata kelola ini adalah Status Pengaduan Masyarakat, Penaatan Industri Terhadap Peraturan, Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Jumlah dan Ijin Usaha dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.

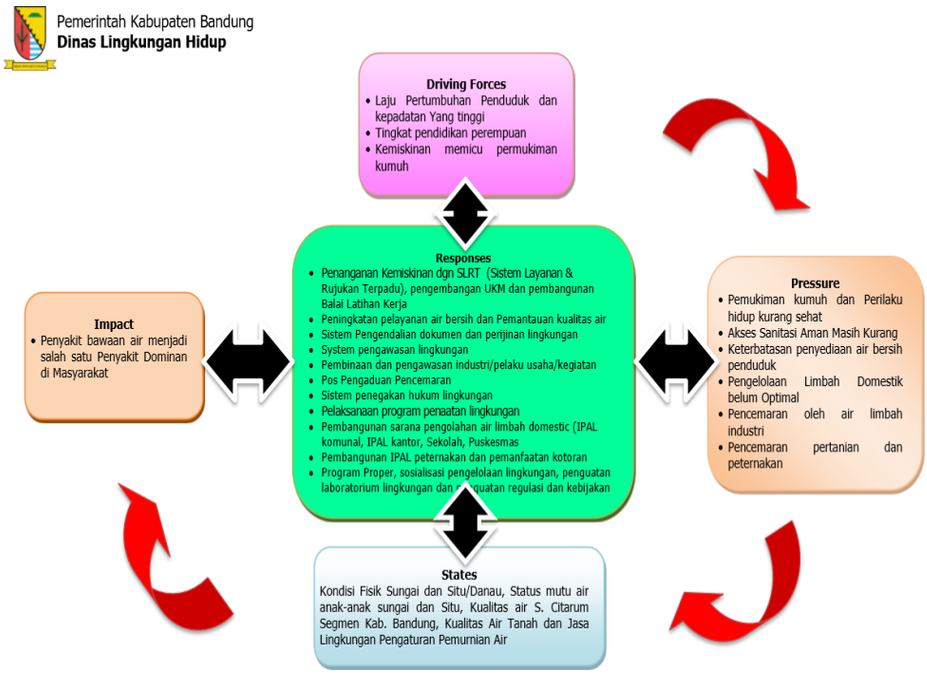
2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;

a. Isu Tata Guna Lahan



Gambar 2.3
DPSIR Isu Tata Guna Lahan

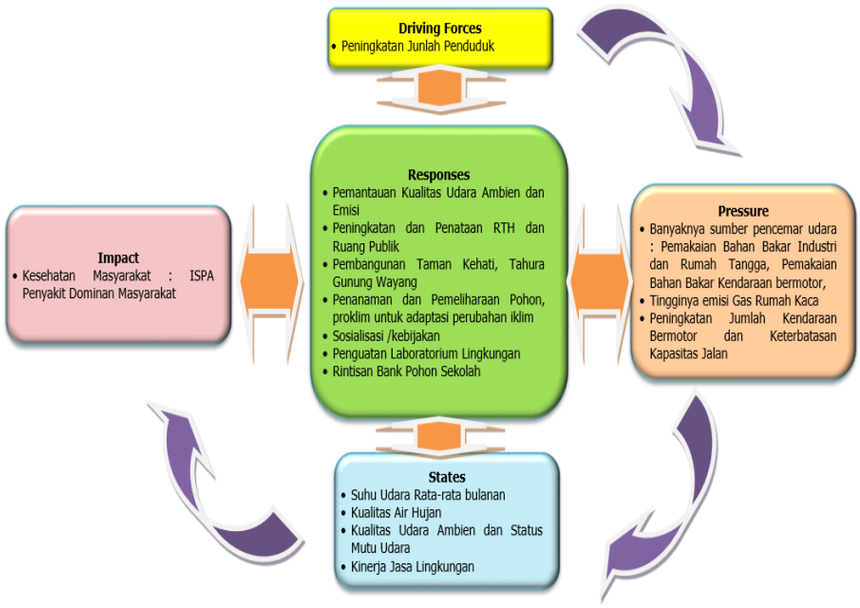
b. Isu Kualitas Air



Gambar 2.4
DPSIR Isu Kualitas Air

c. Isu Kualitas Udara

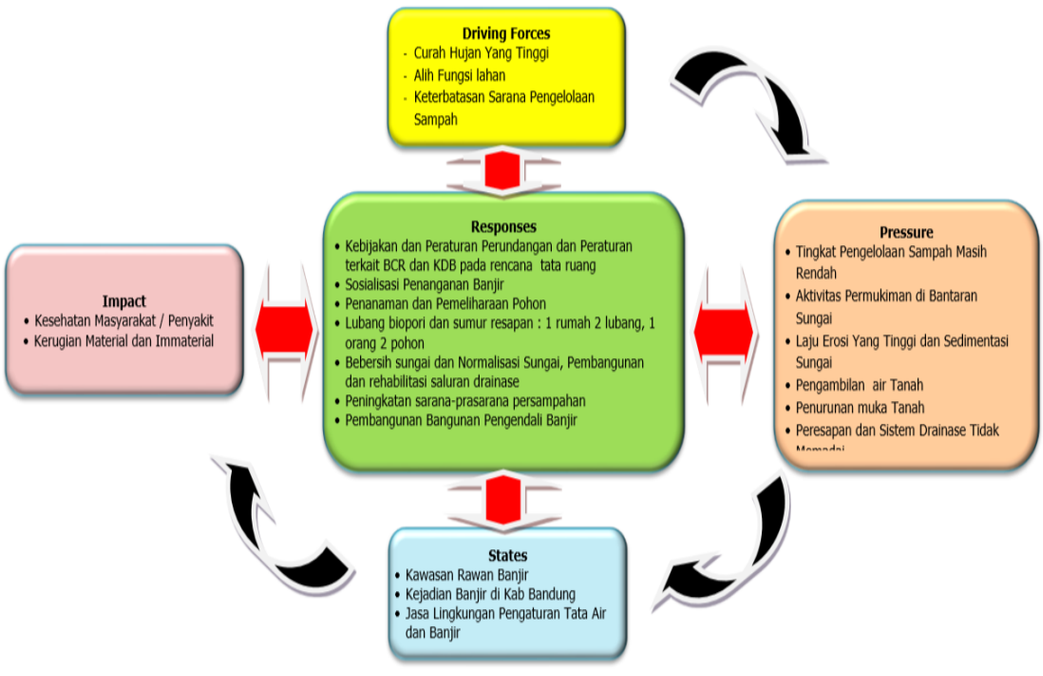
Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2.5
DPSIR Isu Kualitas Udara

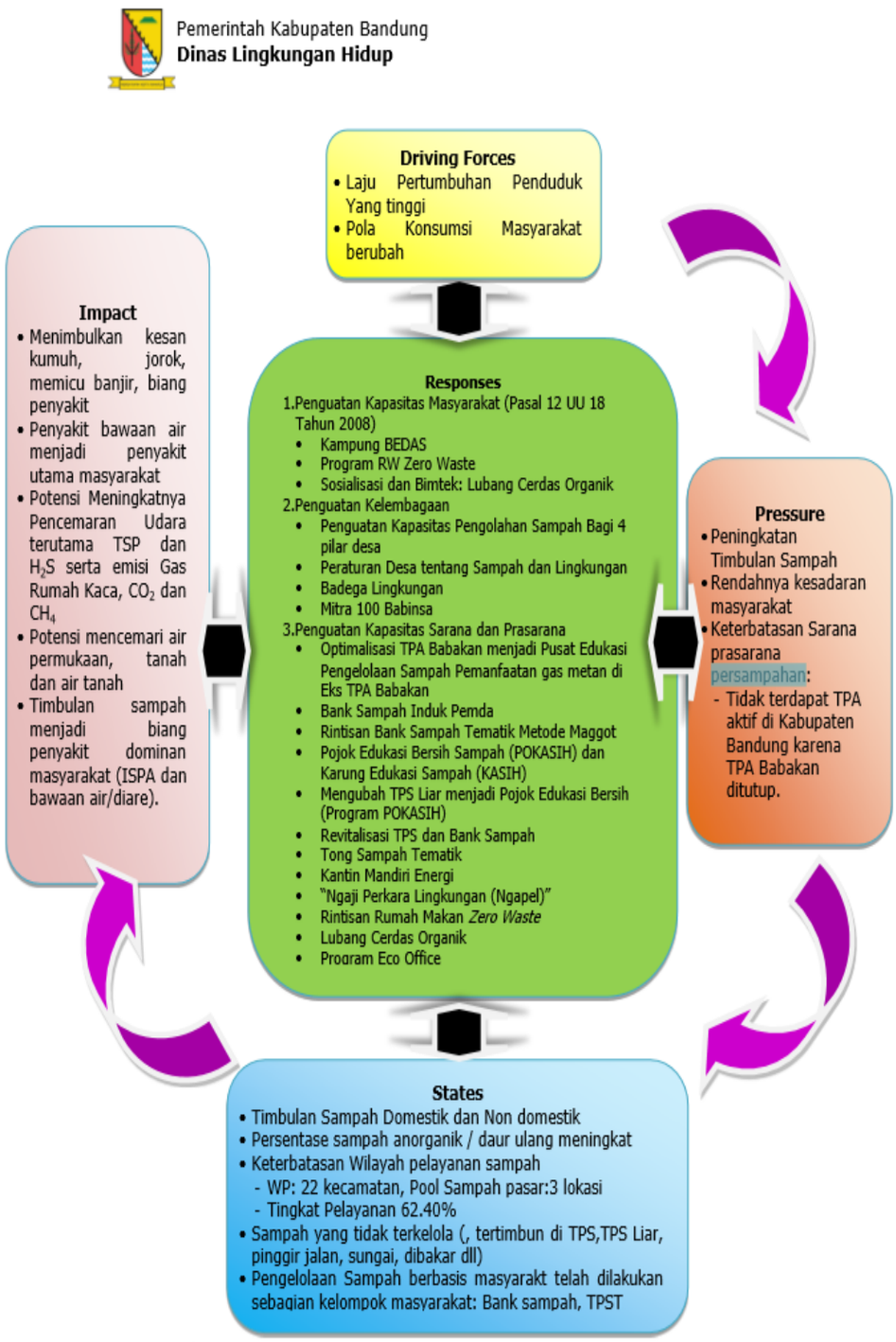
d. Isu Resiko Bencana/Banjir

Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2.6
DPSIR Isu Resiko Bencana/Banjir

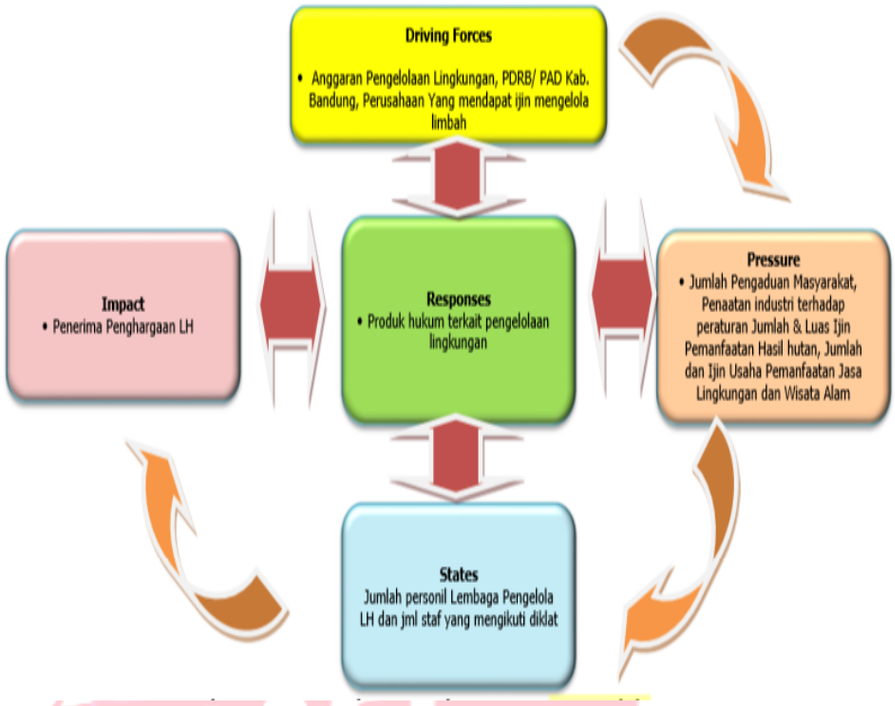
e. Isu Perkotaan/Persampahan



Gambar 2.7
DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan

f. Isu Tata Kelola

Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2.8
DPSIR Isu Tata Kelola

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Secara umum, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah:

- SDM yang berkualitas, untuk merespon berbagai permasalahan diperlukan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatannya. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan peningkaatan kualitas SDM melalui berbagai diklat sesuai dengan kebutuhan komptensi.
- Alokasi anggaran. Dari tahun ke tahun alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup meningkat. Hal tersebut mendukung terhadap pemenuhan kebutuhan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Aplikasi, semakin banyak aplikasi yang dibuat untuk mendukung kemudahan dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kualitas kerja.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk merespon isu tata guna lahan dilakukan dengan melaksanakan Penerbitan Peraturan dan kebijakan, Gerakan Leweung Wakaf hutan dan KORSA/Konsorsium

Kampung Iklim, KSDA (Konservasi Sumber Daya Air), Pembangunan Sumur Resapan, Penanaman dan pemeliharaan pohon, Pengadaan Tanaman, Sosialisasi, Pembangunan Persemaian Berbasis Masyarakat, Badega Lingkungan, Pengelolaan TKH (Taman Keanekaragaman Hayati), Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kehati, Rintisan Pembangunan Kawasan Tahura Gn Wayang, Kampung BEDAS, Sekolah adiwiyata,Program Lintas Sektor dan Pegiat Lingkungan : Perhutanan Sosial, Tim PPP DAS Terpadu Berbasis Mikro, Wakaf hutan, Pramuka Sakha Kalpataru, Program GAUL, NGAPEL, Haneut Moyan, Sekolah Sungai, Penataan Bantaran Sungai Citarum, Jambore Bank Sampah dan Jambore Lingkungan.

Untuk merespon isu Kualitas Air dilakukan dengan Penanganan Kemiskinan, Penanganan Rutilahu, Peningkatan Pelayanan Penyediaan Air Bersih,Pengendalian Dokumen dan Perijinan Lingkungan, Program Pemantauan Kualitas Air, Sistem Pengawasan Lingkungan , serta Program Pembinaan dan Pengawasan Industri, Pos Pengaduan Pencemaran (Bedas Quick Response), Program Penataan Bantaran Sungai, Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik, Pembangunan IPAL ternak dan pemanfaatan kotoran ternak, Proper, Badega Lingkungan, Balad Badega, Penguatan Laboratorium Lingkungan, Penguatan Regulasi dan Kebijakan. Respon tersebut tertuang dalam Program-program yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Untuk merespon isu kualitas udara dilakukan dengan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon, Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Emisi, Perbaikan Jalan, Pengelolaan dan Penataan Taman, Pembangunan Taman Kehati, Pengawasan dan Penaatan Industri, Penegakan hukum, Pembangunan Tahura Gn Wayang, penataan jalan dan trotoar, Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan. Respon Dinas Lingkungan Hidup tertuang dalam Program-program yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan dan Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal

Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),

Untuk merespon isu kebencanaan/banjir dilakukan dengan Peraturan Terkait Penataan Ruang dan kebencanaan, Sosialisasi Penanggulangan Korban bencana, Penertiban kawasan sempadan sungai, Pembersihan dan pengerukan sungai, pembangunan embung, Penanaman dan Pemeliharaan Pohon, LRB, Sumur Resapan dan instalasi pemanenan air hujan (IPAH), Normalisasi Sungai dan kawasan sempadan sungai, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase, Masterplan Sumber Daya Air /Drainase, Taman Kehati, Tahura Gunung Wayang dan Pembangunan alat pengendali banjir. Respon Dinas Lingkungan Hidup tertuang dalam Program yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sampah.

Untuk merespon isu perkotaan/persampahan dilakukan dengan Penguatan regulasi pengelolaan sampah berbasis Rumah Tangga, Kader Bandung Bedas Bersih Sampah, POKASIH, Unit Reaksi Cepat (URC) Bedas Bersih Sampah, Pengurangan Sampah Berbasis Sistem nilai, Penanganan Sampah Berbasis Sistem nilai: LCO dan Bank Sampah, Pengembangan Bank Sampah Tematik, Penguatan TPS 3R dan TPST, Pengembangan PUSPA, Rintisan RW Zerowaste, Kampung BEDAS (Bebenah Desa Sejahtera), Penanganan sampah berbasis Sarana dan Prasarana Sampah: Penguatan sarana prasarana persampahan, Pemanfaatan sampah menjadi energy berbasis biomassa (RDF), Sosialisasi Pengelolaan Sampah, Sekolah Sampah. respon Dinas Lingkungan Hidup terhadap isu tersebut tertuang dalam Pengelolaan Sampah dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Untuk merespon isu tata kelola dilakukan dengan Produk Hukum pengeloaan lingkungan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelibatan LSM dan pemerhati Lingkungan, Kegiatan Program Yang diinisiasi Masyarakat bidang lingkungan hidup., Pengendalian Dokumen Ijin Lingkungan. Respons atas isu tersebut tertuang dalam Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3 (TC.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**85.713.132.781,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**102.333.520.701,00**	**Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, alokasi anggaran yang tersedia pada rancangan awal tahun 2025 masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 16.462.403.720**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**85.713.132.781,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**102.333.520.701,00**	**16.620.387.920,00**
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Nilai AKIP (Poin)***	**78,25**	**43.212.036.268,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai AKIP (Poin)**	**78,25**	**48.620.298.268,00**	
				Nilai IKM (poin)	**78,75**				**Nilai IKM (poin)**	**78,75**		
				Nilai BMD (poin)	**92**				**Nilai BMD (poin)**	**92**		
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (%)***	***100.00***	**71.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (%)**	**100.00**	**71.000.000**	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	25.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(DLH, KAB. BANDUNG)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	25.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*4*	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*4*	10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	*1 Dokumen*	5.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	*100 Data*	5.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	5.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu (%)***	***100.00***	**27.716.341.268,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu (%)**	**100.00**	**27.731.341.268,00**	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*200.00*	27.706.341.268,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	200.00	27.706.341.268,00	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*28.00*	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	28.00	25.000.000,00	Belanja Bimtek /Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengelola Keuangan (bendahara, BPP, Penata Laporan Keuangan dll)
	2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu (%)***	***100.00***	**10.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu (%)**	**100.00**	**347.600.000,00**	
	2.11.01.2.05.0002						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	271.600.000,00	-Seragam Batik Kina untuk 200 Pegawai ASN sebesar Rp. 70.000.000-Kaos Team/Kaos Pertandingan untuk 576 Pegawai sebesar Rp. 201.600.000
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	*1.00*	10.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.00	76.000.000	-Belanja Sosialisasi Penyusunan Anjab ABK sebesar 42.000.000, dan Sosialisasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sebesar Rp. 9.000.000 -Belanja

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
												Peningkatan kapasitas pegawai sebanyak 50 Orang sebesar Rp. 15.000.000
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor (%)***	***100.00***	**67.765.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor (%)**	**100.00**	**443.817.200,00**	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1.00**	10.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	127.672.200,00	-Belanja ATK (Kertas, Bindex, Clip, Tinta dll) sebesar 50.000.000 -Belanja Alkeb sebesar Rp. 20.000.000 -Belanja Kursi kantor sebanyak 40 unit sebesar Rp.40.768.000 -Belanja stand Microfon sebanyak 2 buah sebesar Rp. 2.152.000 -Belanja CLIP ON MIC Rode Wireless GO 2 Dual Channel Microphone System sebanyak 1 set

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
												sebesar Rp. 4.752.200
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	5.500.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	**1.00**	18.880.000,00	Belanja Galon untuk 1 tahun sebesar Rp. 12.880.000 dan the/kopi/gula selama 1 tahun sebesar Rp. 6.000.000
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	**1.00**	95.000.000,00	-Belanja Penggandaan sebesar Rp. 20.000.000 -Belanja Cetak Disposisi, SKRD, Surat Masuk Surat Keluar dan Map Dinas sebesar Rp. 30.000.000
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*5.00*	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	**5.00**	10.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	*15.00*	8.250.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	**15.00**	8.250.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*25.00*	24.015.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	**25.00**	174.015.000,00	Penambahan untuk kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder kunjungan kerja atau kaji tiru terkait pelayanan publik (penilaian KIP, Ombudsman, E-Lapor dll) ke kabupaten/kota lain Rp. 150.000.000
	2.11.01.2.07						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	(DLH, KAB. BANDUNG)	**Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**582.716.200,00**	
	2.11.01.2.07.0001						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**1**	**167.400.000,00**	-Belanja Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II sebesar Rp. 167.400.000
	2.11.01.2.07.0002						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**3**	**204.120.000,00**	-Belanja Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan sebanyak 3 unit (1 unit untuk sekretaris dan 2 unit untuk eselon III dengan kondisi kendaraan turun mesin dan tahun pengadaan 2012) sebesar Rp. 204.120.000

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.01.2.07.0006						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	211.196.200,00	-Belanja PC I5 sebanyak 6 unit sebesar Rp. 82.026.600 -Belanja Scanner sebanyak 5 unit sebesar Rp. 24.204.000 Printer Dot Matrix sebanyak 4 Unit sebesar 21.202.000 -Printer LED / LCD sebanyak 12 Unit sebesar Rp. 83.763.600
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***100.00***	**13.844.480.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100.00**	**15.846.873.600,00**	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1.00*	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	**1.00**	5.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*12.00*	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	**12.00**	800.000.000,00	Belanja kebutuhan listrik untuk lokasi tambah daya seperti cicukang dan PDU sebesar Rp. 500.000.000
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*368.00*	13.539.480.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	**368.00**	15.041.873.600,00	Belanja Pemenuhan Kekurangan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan belanja pengelola dokumentasi
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)***	***92.00***	**292.450.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)**	**92.00**	**699.450.000,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*1.00*	32.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	**1.00**	31.500.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*122.00*	219.950.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	**122.00**	237.950.000,00	-Penambahan belanja pajak armada sampah sebanyak 6 unit sebesar Rp. 18.000.000
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*29.00*	30.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	**29.00**	30.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*3.00*	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	**3.00**	400.000.000,00	Belanja Rehab Gedung Kantor DLH (Perbaikan atap gedung arsip/gudang) sebesar Rp. 200.000.000 dan Pemeliharaan di Kantor Citaliktik sebesar 200.000.000
	2.11.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan (poin)***	***3.10***	**1.200.000.000,00**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan (poin)**	**3.10**	**2.600.000.000,00**	
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*	*1.00*	1.200.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	**1.00**	2.600.000.000,00	Penyesuaian Belanja dengan target Pendapatan Tahun 2025
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Tersedianya insentif KDH WKDH***	***2***	**10.000.000,00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Tersedianya insentif KDH WKDH**	**2**	**297.500.000,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*2*	10.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	297.500.000,00	Jika Target Pendapatan untuk Retribusi Persampahan sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 5.950.000.000 maka insentif KDH WKDH yang harus dianggarkan adalah sebesar Rp. 297.500.000
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas (%)***	***100.00***	**276.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas (%)**	**100.00**	**376.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Peresentase Capaian Kegiatan terkait RPPLH yang dilaksanakan (%)***	***100.00***	**276.000.000,00**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Peresentase Capaian Kegiatan terkait RPPLH yang dilaksanakan (%)**	**100.00**	**376.000.000,00**	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1.00*	246.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	**1.00**	346.000.000,00	Kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan dalam rangka memastikan dokumen lingkungan telah mengakomodir kebijakan terkait lingkungan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.000.000
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*	*2.00*	30.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	**2.00**	30.000.000,00	
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN**		***Persentase lokasi titik pantau kualitas air (%)***	***46.67***	**600.095.980,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN**		Persentase lokasi titik pantau kualitas air (%)	**46.67**	**1.730.060.500,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
		PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		***Persentase lokasi titik pantau kualitas udara (%)***	***25.80***		**PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		Persentase lokasi titik pantau kualitas udara (%)	**25.80**		
				Penambahan luas tutupan lahan (Ha)	***50.00***				Penambahan luas tutupan lahan (Ha)	**50.00**		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) (Dokumen)*	*1.00*	170.000.000,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) (Dokumen)	**1.00**	170.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*	*5.00*	100.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	**5.00**	100.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)*	*2612.00*	70.000.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	**2612.00**	70.000.000,00	
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase lokasi/titik pencemaran yang ditanggulangi (%)***	***100.00***	**350.035.480,00**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase lokasi/titik pencemaran yang ditanggulangi (%)**	**100.00**	**380.000.000,00**	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)*	*2.00*	350.000.000,00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	**2.00**	350.000.000,00	-
	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)*	*1.00*	35.480,00	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	**1.00**	30.000.000,00	Belanja Bimtek Ngopi Kancing 1 Paket sesuai dengan target dalam Renstra yang disinkronkan dengan Ranwal Renja
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Jumlah area tertanami (Ha)***	***50.00***	**80.060.500,00**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Jumlah area tertanami (Ha)**	**50.00**	**1.180.060.500,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.03.2.03.04	Pelaksanaan Rehabilitasi	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)*	*4.00*	80.060.500,00	Pelaksanaan Rehabilitasi	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dokumen)	4.00	1.180.060.500,00	-Belanja Kegiatan Ngaleuwueng sebanyak 4x sebesar Rp. 300.000.000 -Belanja Kegiatan HMPI sebanyak 1 x sebesar Rp. 150.000.000 -Belanja Penyusunan IKTL sebanya 1 Dokumen sebesar Rp. 50.000.000 -Belanja Bibit untuk memenuhi target luas area yag ditanami seluas 50 Ha sebesar Rp. 600.000.000
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		***Persentase pembangunan Taman Kehati (%)***	***15.00***	**469.190.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase pembangunan Taman Kehati (%)**	**15.00**	**469.190.000,00**	
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	***(Taman Kehati Nagrog, KAB. BANDUNG)***	***Persentase vegetasi tertanam (%)***	***15.00***	**469.190.000,00**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**(Taman Kehati Nagrog, KAB. BANDUNG)**	**Persentase vegetasi tertanam (%)**	**15.00**	**469.190.000,00**	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)*	*78.23*	400.000.000,00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	(DLH, KAB. BANDUNG)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	78.23	400.000.000,00	-
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	*(Taman Kehati Nagrog, KAB. BANDUNG)*	*Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)*	*1*	69.190.000,00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	(Taman Kehati Nagrog, KAB. BANDUNG)	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	69.190.000,00	

BANDUNG BEDAS!

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		***Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap perizinan berusaha (aspek lingkungan) dan Sertifikat Layak Operasi (%)***	***100.00***	**81.738.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap perizinan berusaha (aspek lingkungan) dan Sertifikat Layak Operasi (%)**	**100.00**	**198.030.600,00**	
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi (%)***	***100.00***	**81.738.000,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi (%)**	**100.00**	**198.030.600,00**	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)*	*35.00*	23.006.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	**35.00**	73.006.000,00	Pemenuhunan kegiatan Monitoring lapangan Rp 50.000.000
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	*1.00*	58.732.000,00	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	**1.00**	125.024.600,00	Belanja Sosialisasi terkait Penyusunan Rekomendasi Teknis Lingkungan Hidup dan belanja penagwasan pada pelaku usaha/kegiatan sebesar Rp. 50.000.000
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		***Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial) (%)***	***5.00***	**242.025.600,00**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**Persentase Desa/Kel yang berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial) (%)**	**5.00**	**674.025.600,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) (Laporan)***	***1.00***	**242.025.600,00**	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) (Laporan)**	**1.00**	**674.025.600,00**	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)*	*1.00*	242.025.600,00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	**1.00**	674.025.600,00	Pemenuhan belanja Honorarium Badega Lingkungan sebanyak 3600 OH sebesar Rp. 432.000.000
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		***Persentase Kampung Bedas (%)***	***17.86***	**70.967.839,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase Kampung Bedas (%)**	**17.86**	**2.070.967.839,00**	
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan (Laporan)***	***4.00***	**70.967.839,00**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan (Laporan)**	**4.00**	**2.070.967.839,00**	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*	*3.00*	70.967.839,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	**3.00**	2.070.967.839,00	Belanja Kampung Bedas untuk -10 Desa Tahun 2025 -10 Desa dampingan Tahun 2024 -10 Desa dampingan Tahun 2023 -10 Desa dampingan Tahun 2022 (Tahap 2) Belanja Sekolah Adiwiyata

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
												Belanja Lintas Sektor sebesar Rp.2.000.000.000
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		***Persentase kesesuaian data dan informasi adipura (%)***	***72.00***	**50.000.000,00**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase kesesuaian data dan informasi adipura (%)**	**72.00**	**300.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Jumlah titik pantau yang berkualitas baik (Lokasi)***	***14.00***	**50.000.000,00**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Jumlah titik pantau yang berkualitas baik (Lokasi)**	**14.00**	**300.000.000,00**	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)*	*40.00*	50.000.000,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	**40.00**	300.000.000,00	Belanja Pemenuhan Kegiatan Penilaian Adipura, Penyediaan Sarpras penunjang di lokasi titik pantau dan Honorarium Kader Adipura dengan total kebutuhan sebesar Rp. 250.000.000
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		***Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup (%)***	***100.00***	**160.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup (%)**	**100.00**	**330.000.000,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Jumlah laporan hasil penegakan hukum (Laporan)***	***1.00***	**160.000.000,00**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Jumlah laporan hasil penegakan hukum (Laporan)**	**1.00**	**330.000.000,00**	
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)*	*1.00*	60.000.000,00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	**1.00**	160.000.000,00	Pemenuhuan penunjang untuk kegiatan bedas quick respones pengadauan Rp 100.000.000
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)*	*1.00*	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dokumen)	**1.00**	170.000.000,00	Honor tim pemberian Sanksi pada pelaku usaha/kegiatan (Dansektor, Kapolsek, Tenaga Ahli Kejaksaan) Rp. 50.000.000, uji kompetensi petugas pengambil contoh limbah 4 orang Rp. 20.000.000 dan kegiatan Gakumdu
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		***Persentase Volume Sampah yang terkelola (%)***	***87.15***	**40.551.079.094,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Persentase Volume Sampah yang terkelola (%)**	**87.15**	**47.564.947.894,00**	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***(DLH, KAB. BANDUNG)***	***Persentase Volume Sampah yang terkelola (%)***	***87.15***	**40.551.079.094,00**	**Pengelolaan Sampah**	**(DLH, KAB. BANDUNG)**	**Persentase Volume Sampah yang terkelola (%)**	**87.15**	**47.564.947.894,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)*	*20.00*	132.910.500,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	**20.00**	7.156.779.300,00	-Belanja Kader Kabupaten Bandung Bedas Bersih Sampah (KBBBS) sebanyak 348 Orang selama 12 Bulan Rp. 5.220.000.000, -Belanja Alat Kebersihan (Gacok, Sapu, Karung, pengki, singkup dll) sebesar Rp. 310.000.000, -Belanja APD sebanyak 348 Set (Rompi, Sepatu, Topi, Sarung Tangan dan Masker) sebesar Rp. 104.400.000
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)*	*7.00*	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	**7.00**	-	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)*	*7.00*	2.547.774.919,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	**7.00**	2.547.774.919,00	Untuk Belanja Mesin Proses Line RDF TPST Kabupaten Bandung

BANDUNG BEDAS!

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14	17
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)*	*1.00*	10.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	**1.00**	10.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)*	*1.00*	10.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	(DLH, KAB. BANDUNG)	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	**1.00**	10.000.000,00	
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)*	*2.00*	3.007.896.000,00	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)	**2.00**	3.007.896.000,00	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*(DLH, KAB. BANDUNG)*	*Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)*	*87024.96*	34.832.497.675,00	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	(DLH, KAB. BANDUNG)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)	**87024.96**	34.832.497.675,00	
	JUMLAH					**85.713.132.781,00**					**102.333.520.701,00**	

2.4.1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan Rrancangan yang termuat dalam Rentra Tahun 2021-2026. Namun alokasi anggaran yang termuat dalam pagu pendaan masih dalam keterbatasan. Sehingga dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan historis dan komponen belanja wajib mengikat.

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Analisis kebutuhhan dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja yang ditetapkan dengan kebutuhan alokasi anggaran. Hal tersebut dilakukan karena pada pagu pendanaan merupakan pagu indikatif belum dengan kebutuhann kondisi terkini.

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

Pada analisis kebutuhan terdapat beberapa Sub Kegiatan baru yang diusulkan berikut dengan kebutuhan alokasi anggaran. Berikut Sub Kegiatan tersebut.

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan indicator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 2 jenis yaitu untuk pengadaan pakaian batik kina sebanyak 200 buah dan pengadaan pakaian olah raga sebanyak 576 buah dengan besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 271.600.000,00;
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indicator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan sebanyak 1 unit dibutuhkan alokasi anggaran sebesaar Rp. 167.400.000,00 (Sewa Kendaraan Kepala Dinas (2000 -2800 cc));
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indiikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 3 unit yang terdiri dari 1 unit untuk sekretaris dan 2 unit untuk eselon III dengan kondisi kendaraan turun mesin dan tahun pengadaan 2012 sebesar Rp. 204.120.000;
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.000.000,00 (Penyediaan PC I5 sebanyak 6 unit sebesar Rp. 82.026.600, Scanner sebanyak 5 unit sebesar Rp. 24.204.000, Printer Dot Matrix sebanyak 4 Unit sebesar 21.202.000,Printer LED / LCD sebanyak 12 Unit sebesar Rp. 83.763.600) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 211.196.200,00.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendektan *top down* dan *bottom up*.

Berikut ini merupakan Rincian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BANDUNG BEDAS!

Tabel TC. 32

Rekapitulasi Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
A.1	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	SDN Bojongmalaka 01, Kab. Bandung	Bojongmalaka	Baleendah	#MS Sumur Resapan	1	Unit	
A.2		KP BEOR RW 011, Kab. Bandung	Babakan Peuteuy	Cicalengka	#MS Sumur Resapan	1	Unit	
A.3		RW 02, 03, 07, 08, Kab. Bandung	Mekarlaksana	Cikancung	#MS Bimbingan Teknis Konservasi Sumber Daya Air (KSDA)	40	peserta	
A.4		Permata Biru RW 23, Kab. Bandung	Cinunuk	Cileunyi	#MS Sumur Resapan	1	Unit	
A.5		Dusun I, Kab. Bandung	Tarumajaya	Kertasari	#MS Sumur Resapan	1	Unit	
A.6		RW 007, Kab. Bandung	Magahayu Selatan	Margahayu	#MS Sumur Resapan	1	Unit	
A.7		Desa Ciherang, Kab. Bandung	Ciherang	Nagreg	#MS Bimbingan Teknis Konservasi	40	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
					Sumber Daya Air (KSDA)			
A.8		Kp. SIndangreret RW 8 Kab. Bandung	Sukasari	Pameungpeuk	#MS Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH) Air Baku	1	Unit	
A.9		kp. peujeuh RW 07, Kab. Bandung	Drawati	Paseh	#MS Sumur Resapan	1	Unit	
	JUMLAH					**87**	**Unit/Peserta**	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
B.1	2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Desa Mekarsari, Kab. Bandung	Pasirjambu	Pasirjambu	#MS Pelatihan dan Pembuatan Unit Ngopi Kancing (Ngolah Kotoran Sapi Menjadi Kascing dan Cacing)	25	Peserta	
	JUMLAH					**25**	**Peserta**	
C.1	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	Kp.ancol Rt.001/004 , Kab. Bandung	Arjasari	Arjasari	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	
C.2		RW. 02, RW. 04, RW. 05, RW. 06, RW. 07 Desa Bandasari, Kab. Bandung	Cangkuang	Cangkuang	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree	200	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
					Species (MPTS) Buah-buahan			
C.3		RW 01 - RW 26, Kab. Bandung	Cileunyi	Cileunyi	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	250	peserta	
C.4		Ds. Pasirhuni RW. 06 RT. 03, Kab. Bandung	Cimaung	Cimaung	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Kayu-kayuan	200	Peserta	
C.5		Cikahuripan RT 01 RW 04, Kab. Bandung	Cimenyan	Cimenyan	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Kayu-kayuan	200	Peserta	
C.6		rw 06 , Kab. Bandung	Majalaya	Majalaya	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	
C.7		KP.WANASUKA RT.001 RW. 006,KP.WANASUKA RT.001 RW.007, Kab. Bandung, Kab. Bandung	Pangalengan	Pangalengan	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
C.8		desa cijagra, Kab. Bandung	Paseh	Paseh	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Kayu-kayuan	200	Peserta	
C.9		Desa Cigentur 400 Paket, Kab. Bandung	Paseh	Paseh	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	
C.10		Kp. Jegud RW 10, Kab. Bandung	Pasirjambu	Pasirjambu	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	
C.11		Desa Solokanjeruk, Kab. Bandung	Solokanjeruk	Solokanjeruk	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	
C.12		wilayah Desa Parungserab, Kab. Bandung	Soreang	Soreang	#MS Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Buah-buahan	200	Peserta	
	JUMLAH					**2450**	**Peserta**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Pengelolaan Sampah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 1	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	kp.janggol rt 03 rw 06, Kab. Bandung	Mangunjaya	Arjasari	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 2		kp.cijengkol rt 01 rw 01, Kab. Bandung	Mangunjaya	Arjasari	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 3		kp.pakarangan rt 03 rw 01, Kab. Bandung	Mangunjaya	Arjasari	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 4		KARANG TARUNA Desa Patrolsari, Kab. Bandung	Patrolsari	Arjasari	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	8	Peserta	
D. 5		KARANG TARUNA KELURAHAN JELEKONG (GEMA SEJAHTERA), Kab. Bandung	Jelekong	Baleendah	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 6		Kp Tarigu RT 04 RW 02, Kab. Bandung	Margahurip	Banjaran	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 7		Jalan Raya Pagalengan No. 446 Kiangroke, Kab. Bandung	Kiangroke	Banjaran	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 8		Desa Sindangpanon, Kab. Bandung	Sindangpanon	Banjaran	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 9		Desa Mekarjaya, Kab. Bandung	Mekarjaya	Banjaran	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	4	Peserta	
D. 10		RW. 003, Kab. Bandung	Kamasan	Banjaran	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	6	Peserta	
D. 11		cangkuang rw 01 sampe rw 012, Kab. Bandung	Cangkuang	Cangkuang	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 12		Desa Tanjungsari, Kab. Bandung	Tanjungsari	Cangkuang	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 13		Desa Tenjolaya RW.01 - RW.10, Kab. Bandung	Tenjolaya	Cicalengka	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	
D. 14		KP BEOR RT 001 RW 009, Kab. Bandung	Babakan Peuteuy	Cicalengka	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 15		Bojong Badak Endah RT.005 RW.009, Kab. Bandung	Cikasungka	Cikancung	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	
D. 16		Kp. Cirungki RT 001 RW 004, Kab. Bandung	Hegarmanah	Cikancung	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	10	Peserta	
D. 17		Desa Warjabakti , Kab. Bandung	Warjabakti	Cimaung	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 18		Kp. Madur Tengah RT 01 RW 05, Kab. Bandung	Sukamaju	Cimaung	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 19		Kp. Kebontunggul RT 004 RW 011, Kab. Bandung	Campakamulya	Cimaung	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	
D. 20		DESA CIWIDEY, RW 13 CIWIDEY KULON , Kab. Bandung	Ciwidey	Ciwidey	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Orang	
D. 21		Kp Sangkan RW 01, Kab. Bandung	Laksana	Ibun	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 22		Kp. Sangkan RT 02 RW 01, Kab. Bandung	Laksana	Ibun	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 23		KP. Sayang RW 05 Desa Karyalaksana, Kab. Bandung	Karyalaksana	Ibun	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 24		KP. CISEKE RW. 05, Kab. Bandung	Sudi	Ibun	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 25		Kp. Lampegan RT 001 RW 004, Kab. Bandung	Lampegan	Ibun	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 26		Desa Jatisari RW.001, Kab. Bandung	Jatisari	Kutawaringin	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 27		Desa Sukamulya, Kab. Bandung	Sukamulya	Kutawaringin	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	
D. 28		Kp.Nenggeng RT 02 RW 10 (TPS3R), Kab. Bandung	Citaman	Nagreg	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 29		Pemerintah Desa Ciaro, Kab. Bandung	Ciaro	Nagreg	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	
D. 30		desa nagreg, Kab. Bandung	Nagreg	Nagreg	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 31		Desa Ciherang, Kab. Bandung	Ciherang	Nagreg	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	10	Peserta	
D. 32		TPS3R Kp. Ciririp/Cibolang RW 19, Kab. Bandung	Lamajang	Pangalengan	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 33		KPP CIWIDARA ASRI RT 005 RW 014 LANGBONG, Kab. Bandung	Pangalengan	Pangalengan	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 34		KP sukamenak , Cipanas, Padamukti Rancamanyar, Kab. Bandung	Margamukti	Pangalengan	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 35		rw 15, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 36		rw 05, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 37		rw 11, Kab. Bandung	Sukamanah	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 38		Desa Loa, Kab. Bandung	Loa	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	2	Peserta	
D. 39		kp lengo rw 01, Kab. Bandung	Loa	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 40		Desa Mekarpawitan, Kab. Bandung	Mekarpawitan	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 41		Desa Karangtunggal, Kab. Bandung	Karangtunggal	Paseh	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
D. 42		Kp. Nagrak RT 003 RW 014, Kab. Bandung	Margamulya	Pasirjambu	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
D. 43		Desa Tegal Sumedang, Kab. Bandung	Tegal Sumedang	Rancaekek	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 44		Kp. Rancadarah RW 012, Kab. Bandung	Nanjung Mekar	Rancaekek	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	5	Peserta	
D. 45		Desa Jelegong KP. Talun RT 004 RW 011, Kab. Bandung	Jelegong	Rancaekek	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	7	Peserta	
D. 46		desa cibodas, Kab. Bandung	Cibodas	Solokanjeruk	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	8	Peserta	
D. 47		Wilayah Desa Parungserab , Kab. Bandung	Parungserab	Soreang	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	4	Peserta	
D. 48		Tim Pengelola Sampah di Desa Sadu, Kab. Bandung	Sadu	Soreang	#MS Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	3	Peserta	
	JUMLAH					**216**	**Peserta**	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.1	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kp. Cisalak RT 02 RW 15, Kab. Bandung	Arjasari	Arjasari	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.2		Kp. Batusari Rw 15, Kab. Bandung	Patrolsari	Arjasari	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	3	Unit	
E.3		batukarut mangunjaya, Kab. Bandung	Mangunjaya	Arjasari	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.4		RW 04, RW 06 RW 07 RW 10 RW 11 RW 14 RW 15 RW 16 RW 23, Kab. Bandung	Rancamanyar	Baleendah	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.5		TPS Mandiri RW 04 , Kab. Bandung	Manggahang	Baleendah	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.6		KP CIPICUNG RW 02, Kab. Bandung	Manggahang	Baleendah	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.7		RW 05, Kab. Bandung	Bojongmalaka	Baleendah	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.8		TPS Kelurahan Balendah , Kab. Bandung	Baleendah	Baleendah	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.9		Kp.Cileutik RW 07, Kab. Bandung	Banjaran Wetan	Banjaran	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.10		RW 02,03,04,05,06, Kab. Bandung	Ciapus	Banjaran	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.11		RW 08, RW 07, RW 05, Kab. Bandung	Banjaran Kulon	Banjaran	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.12		Kampung Bugel Girang Rw.08, Kab. Bandung	Neglasari	Banjaran	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.13		Cipurut RW 11, Cijagra RW 10 dan Cijagra RW 17, Kab. Bandung	Bojongsoang	Bojongsoang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.14		KP. MARGALAKSANA RT.02 RW.02, Kab. Bandung	Buahbatu	Bojongsoang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.15		Kp. Lembang Dua RT 06 RW 11 (TPS3R), Kab. Bandung	Bojongsari	Bojongsoang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.16		Kp Ciganitri RW 05, Kab. Bandung	Cipagalo	Bojongsoang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.17		Komp GBA 3 RW 08, Kab. Bandung	Cipagalo	Bojongsoang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.18		Kp Ciganitri RW 11, Kab. Bandung	Cipagalo	Bojongsoang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.19		KP. SAPAN RT.002/001, RW.011, RW.014, Kab. Bandung	Tegalluar	Bojongsoang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.20		Parahyangan Kencana Rw.07, Kab. Bandung	Nagrak	Cangkuang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.21		Kp. Cisalak RW 03, Kp. Salamanjah RW 01, Kp. Singkur RW 06, Kp. Cirangang RW 05, Kab. Bandung	Jatisari	Cangkuang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.22		TPS Kp. Karihkil RW.10, Kab. Bandung	Nagrog	Cicalengka	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.23		Kp. Dungusmaung RW 07, Kab. Bandung	Cikuya	Cicalengka	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.24		Kp. Dungusmaung RW 08, Kab. Bandung	Cikuya	Cicalengka	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.25		Kp. Babakan DKA RW 14, Kab. Bandung	Cikuya	Cicalengka	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.26		KP BEOR RT 001 RW 009, Kab. Bandung	Babakan Peuteuy	Cicalengka	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.27		KP. Cicaringin RW.11, Kab. Bandung	Cikasungka	Cikancung	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.28		Kp. Warunglega Rt. 01 Rw. 06, Kab. Bandung	Tanjunglaya	Cikancung	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.29		bank sampah dahlia mekar desa cihanyir, Kab. Bandung	Cihanyir	Cikancung	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.30		TPS 3R Jl. Jambe Panganten RW 10 Desa Jatiendah, Kab. Bandung	Jatiendah	Cilengkrang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.31		TPS 3R Desa Jatiendah, Jl. Jambe Panganten RW 10, Kab. Bandung	Jatiendah	Cilengkrang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.32		Kp. Ciwaru RW 04, Kab. Bandung	Cilengkrang	Cilengkrang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.33		Rumah Pilah Sampah CIkoneng II Desa Cibiru Wetan, Kab. Bandung	Cibiru Wetan	Cileunyi	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.34		desa cileunyi wetan, Kab. Bandung	Cileunyi Wetan	Cileunyi	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.35		Kp. Margamulya RW. 01, Kab. Bandung	Cimekar	Cileunyi	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.36		Desa Mekarsari, Kab. Bandung	Mekarsari	Cimaung	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.37		kp. Pasir Biru Rt 02 Rw 05 Desa Cimaung, Kab. Bandung	Cimaung	Cimaung	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.38		Ds. pasirhuni Rw. 06/03, Kab. Bandung	Pasirhuni	Cimaung	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.39		Kp. Cipinang RW 12 RT 01, Kab. Bandung	Cipinang	Cimaung	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.40		Kp. Buntis RW 014, Kab. Bandung	Cimenyan	Cimenyan	#MS Pengembangan/ Pembangunan Bank Sampah Tematik	1	Unit	
E.41		Pasirlayung RW 07, Kab. Bandung	Padasuka	Cimenyan	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.42		RW 01, RW 05, RW 07, Kab. Bandung	Serangmekar	Ciparay	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.43		Kp. Pamagersari RW 05, Kab. Bandung	Pakutandang	Ciparay	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.44		KP. DEPOK RW.12, Kab. Bandung	Mangunharja	Ciparay	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.45		KP. Patrol RW 005, Kab. Bandung	Sumbersari	Ciparay	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.46		Bank Sampah BERSEKA Desa Babakan, Kab. Bandung	Babakan	Ciparay	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.47		TPS 3R REUJEUNG RESIK (KP. BOJONG RW 006), Kab. Bandung	Ciparay	Ciparay	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.48		KP. TONJONG RW 01 DESA MEKARLAKSANA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG KODE POS 40381, Kab. Bandung	Mekarlaksana	Ciparay	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.49		Kp. rancaboro RW 07 Dan Kp. Sayuran RW 08, Kab. Bandung	Sagaracipta	Ciparay	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.50		RW 15 kp.Ciloa 3 Desa Panyocokan, Kab. Bandung	Panyocokan	Ciwidey	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.51		kp. Panundaan, Kab. Bandung	Panundaan	Ciwidey	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.52		RW 01 sampai deengan RW 12 di Wilayah Desa Cangkuang Wetan, Kab. Bandung	Cangkuang Wetan	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.53		RW 10,18 dan RW 22, Kab. Bandung	Cangkuang Kulon	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.54		Rw-01 sampai Rw-14 desa dayeuhkolot, Kab. Bandung	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.55		RW 03, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.56		RT 09 RW 04, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.57		Dusun I , Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Kab. Bandung	Citeureup	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.58		RW. 010 Rahayu , Kab. Bandung	Pasawahan	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.59		RW. 01, Kab. Bandung	Sukapura	Dayeuhkolot	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.60		KP SUKAEURIH RW 010, Kab. Bandung	Cibeet	Ibun	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.61		KP CIANDONG RT 03 RW 10, Kab. Bandung	Dukuh	Ibun	#MS Pengembangan/ Pembangunan Bank Sampah Tematik	1	Unit	
E.62		Kp. Talun RT 3 RW 4, Kab. Bandung	Tangulun	Ibun	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.63		Kp. Patrol RW 009, Kab. Bandung	Gandasari	Katapang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.64		TPS 3R RESIK MANDIRI RW.13, Kab. Bandung	Sangkanhurip	Katapang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.65		Jl. Gandasoli Cikambuy No. 1, Banyusari Katapang, Kab. Bandung	Banyusari	Katapang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.66		Kp. Bojong Salak RW 22, Kp. Muara Ciwidey RW 14, Kp. Lebak Muncang RW 17, Kab. Bandung	Cilampeni	Katapang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.67		Kp.Pasirmuncang RW 09, Kab. Bandung	Resmi Tingal	Kertasari	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.68		kp.sukasari rw 013, Kab. Bandung	Cibeureum	Kertasari	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.69		Dusun Goha I Desa Tarumajaya, Kab. Bandung	Tarumajaya	Kertasari	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.70		Rw 01 s/d 10 Desa Santosa kecamatan kertasari, Kab. Bandung	Santosa	Kertasari	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.71		KP. Pameuntasan RT 002 RW 007, Kab. Bandung	Pameuntasan	Kutawaringin	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.72		Kp. campaka RW 14, Kab. Bandung	Buninagara	Kutawaringin	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.73		Desa Padasuka, Kab. Bandung	Padasuka	Kutawaringin	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.74		kp bojonglaja rt 02 rw 16 Desa Kutawaringin, Kab. Bandung	Kutawaringin	Kutawaringin	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.75		WILAYAH DESA CILAME, Kab. Bandung	Cilame	Kutawaringin	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.76		KMP CISAAT RW 03, Kab. Bandung	Jelegong	Kutawaringin	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.77		Kp. Bojong Nangka RW 13, Kab. Bandung	Kopo	Kutawaringin	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.78		Kp. Sukamanah RW 06, Kab. Bandung	Majakerta	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.79		Kp. Babakan jambu RW 11, Kab. Bandung	Majakerta	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.80		RW. 011 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kab. Bandung , Kab. Bandung	Majasetra	Majalaya	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.81		Kp Rancajigang RT 002 Rw 012 , Kab. Bandung	Padamulya	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.82		Kp.Namicalung RT 02 RW 05, Kab. Bandung	Bojong	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.83		Kp.Buah Jajar RT 01 RW 03, Kab. Bandung	Bojong	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.84		Kp. rumacaang RW. 10 (Bank Sampah Barokah), Kab. Bandung	Wangisagara	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.85		TPS3R DESA PADAULUN SEHAT KP.TONJONG RT.02 RW.09, Kab. Bandung	Padaulun	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.86		KP.PANGKALAN RAJA RW 05, Kab. Bandung	Sukamukti	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.87		RW.05,06,07,09,12,19,20,22, 23, 01, Kab. Bandung	Biru	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.88		Kp Leuwidulang RW 004, Kab. Bandung	Sukamaju	Majalaya	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.89		Desa Nanjung, Kab. Bandung	Nanjung	Margaasih	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.90		Desa Rahayu, Kab. Bandung	Rahayu	Margaasih	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.91		Rw.08, Rw.01 dan Rw.03, Kab. Bandung	Cigondewah Hilir	Margaasih	#MS Roda Sampah Dari Plat	2	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
					Besi Kapasitas 1 m3			
E.92		DESA MARGAASIH, Kab. Bandung	Margaasih	Margaasih	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.93		RW14,15,16, Kab. Bandung	Lagadar	Margaasih	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.94		Mekarrahayu, Kab. Bandung	Mekarrahayu	Margaasih	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.95		Jl Hercules IV no.21 , Kab. Bandung	Sulaiman	Margahayu	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.96		JL. KOPO BIHBUL RT 01 RW 02 , Kab. Bandung	Margahayu Tengah	Margahayu	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.97		Kantor Kepala Desa Sayati, Kab. Bandung	Sayati	Margahayu	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.98		Kp. Tegallame Rw. 07, Kab. Bandung	Ciaro	Nagreg	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.99		Kp. Pamucatan RT. 01 RW. 06, Kab. Bandung	Nagreg Kendan	Nagreg	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.100		Kp Babakan Timur RW 08, Kab. Bandung	Nagreg	Nagreg	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.101		Kp Pamucatan RW 14, Kab. Bandung	Nagreg	Nagreg	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.102		RW 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, Kab. Bandung	Mandalawangi	Nagreg	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.103		Kp. Cikatul RW 07 Desa Mekarsari , Kab. Bandung	Mekarsari	Pacet	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.104		KP.SAYURAN RW 09, Kab. Bandung	Girimulya	Pacet	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.105		SUKARAME, Kab. Bandung	Sukarame	Pacet	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.106		3 pcs, Kp Limus RW 10 , Kab. Bandung	Maruyung	Pacet	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	3	Unit	
E.107		Kp.Bojongwaru RW.11 Kp.Rancaengang RW.08 Kp.Sekeawi RW.10, Kab. Bandung	Rancamulya	Pameungpeuk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.108		Kp. Sayang Rt. 01 Rw. 09, Kab. Bandung	Rancatungku	Pameungpeuk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.109		DESA BOJONGMANGGU, Kab. Bandung	Bojongmanggu	Pameungpeuk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.110		Desa Langonsari, Kab. Bandung	Langonsari	Pameungpeuk	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.111		Desa Sukamanah, Kab. Bandung	Sukamanah	Pangalengan	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.112		KELOMPOK TANI BABAKAN 2 KP.MEKARBAKTI RW 01 DAN RW 02, Kab. Bandung	Margamekar	Pangalengan	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.113		KPP CIWIDARA ASRI RT 005 RW 014 LANGBONG, Kab. Bandung	Pangalengan	Pangalengan	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.114		Kp. Cikondang RW 03, Kab. Bandung	Lamajang	Pangalengan	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.115		Kp. Baru RW 06, Kab. Bandung	Lamajang	Pangalengan	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.116		KSM AIRA Kp. Pabrik RW 015, Kab. Bandung	Pulosari	Pangalengan	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.117		Kp.Cibadak RW 07, Kab. Bandung	Margaluyu	Pangalengan	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.118		07,05,04.03, Kab. Bandung	Margamukti	Pangalengan	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.119		KP PANGGILINGAN RT 013 RW 014, Kab. Bandung	Sukamantri	Paseh	#MS Roda Sampah Dari Plat	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
					Besi Kapasitas 1 m3			
E.120		desa drawati, Kab. Bandung	Drawati	Paseh	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.121		Kp Binakarya RT 001 RW 002, Kab. Bandung	Sindangsari	Paseh	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.122		Rw.02 Rw.03 Rw.04 Rw 09 Rw.16 , Kab. Bandung	Cipaku	Paseh	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.123		apik resik / kp. tangsi 2 rt 01 rw 07, Kab. Bandung	Tangsimekar	Paseh	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.124		1. PENGELOLA SAMPAH KP. BAKUNG RW002 2. TPS 3 R KP. BOJONG RW.004 3. PENGELOLA SAMPAH RW.005, Kab. Bandung	Cigentur	Paseh	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.125		Karangtunggal, Kab. Bandung	Karangtunggal	Paseh	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.126		KP PASIRWARU RW 006, Kab. Bandung	Cibodas	Pasirjambu	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.127		Desa Tenjolaya, Kab. Bandung	Tenjolaya	Pasirjambu	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
E.128		JL SALAMANJAH NO 35, Kab. Bandung	Mekarmaju	Pasirjambu	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.129		Rw 02 Kp.Muara, Kab. Bandung	Cikoneng	Pasirjambu	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.130		Desa Patengan, Kab. Bandung	Patengan	Rancabali	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.131		PASIRLUHUR RW 19, Kab. Bandung	Alamendah	Rancabali	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.132		Kp. Sinumbra RW 04 dan Kp. Sinumbra RW 05, Kab. Bandung	Indragiri	Rancabali	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.133		Kp. Sawargi RT 004 RW 011, Kab. Bandung	Sukaresmi	Rancabali	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.134		Kelompok SABER Kp. Muaracagak RT 04 RW 02, Kab. Bandung	Sukaresmi	Rancabali	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.135		Desa Linggar, Kab. Bandung	Linggar	Rancaekek	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.136		Kp. Ciluncat RT. 001 RW. 006, Kab. Bandung	Tegal Sumedang	Rancaekek	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.137		Kp. Tanggeung Rw 14, Kab. Bandung	Bojongloa	Rancaekek	#MS Roda Sampah Dari Plat	1	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
					Besi Kapasitas 0,84 m3			
E.138		Perum Griya Permata Raya, Kab. Bandung	Nanjung Mekar	Rancaekek	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.139		Desa Cangkuang RW 001, 002, 003, 006, 010, 011, Kab. Bandung	Cangkuang	Rancaekek	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.140		KP.GANDOK RW 05, Kab. Bandung	Bojongsalam	Rancaekek	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.141		KP.MARIUK RW 010, Kab. Bandung	Bojongsalam	Rancaekek	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.142		kp cibodas rw 009,rw 011,rw 014,rw 017, Kab. Bandung	Cibodas	Solokanjeruk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.143		Kantor Pemdes Padamukti, Kab. Bandung	Padamukti	Solokanjeruk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.144		Tps 3R Desa Bojongemas, Bandung	Bojongemas	Solokanjeruk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	2	Unit	
E.145		Badega Sampah, Kab. Bandung	Langensari	Solokanjeruk	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.146		Kp. Sukaraja Rw 008, Kab. Bandung	Solokanjeruk	Solokanjeruk	#MS Roda Sampah Dari Plat	3	Unit	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME		CATATAN
		ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		VOLUME	SATUAN	
					Besi Kapasitas 1 m3			
E.147		Kp. Lalareun RW. 003 Kp. Kantreng RW. 006 Kp. Citoke RW. 010 Kp. Lalareun RW. 004, Kab. Bandung	Rancakasumba	Solokanjeruk	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	2	Unit	
E.148		Kp.Sangkali RW.07, Kab. Bandung	Cingcin	Soreang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	1	Unit	
E.149		Kp Bandawa RW 15 Desa Soreang, Kab. Bandung	Soreang	Soreang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.150		Kp Ciburial Timur RW 06 Desa Soreang, Kab. Bandung	Soreang	Soreang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.151		Kantor Desa Panyirapan RT 003 RW 004 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang, Kab. Bandung	Panyirapan	Soreang	#MS Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	1	Unit	
E.152		RW 12 Desa Pamekaran, Kab. Bandung	Pamekaran	Soreang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
E.153		RW 14 Desa Pamekaran, Kab. Bandung	Pamekaran	Soreang	#MS Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	1	Unit	
	JUMLAH					**183**	**Unit**	

Selain belanja musrenbang juga terdapat belanja Pokir dengan total anggaran sebesar Rp. 1.192.233.248. Adapun rincian belanja POKIR dapat dilihat pada table berikut.

Tabel Belanja Pokir Tahun 2025

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3867	727239	29-02-2024	ACEP ANA, S.Ag.	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp Beor RW 09 Desa babakan euteuy Kec Cicalengka, Kab. Bandung	4.009.000	6	Unit	24.054.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
3158	677174	24-02-2024	AEP DEDI DS	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	KSM Kp.Murci RW 02 Desa Cilampeni Kec.Katapang, Kab. Bandung	4.009.000	2	Unit	8.018.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
307	548074	23-01-2024	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Tarigu Rt. 02 / Rw. 04 , Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran , Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	4.009.000	5	Unit	20.045.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3549	696872	26-02-2024	AI YULIA, S.IP	#PK Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	Kp jatimekar rt/rw 02/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	1.247.904	20	Peserta	24.958.080	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1106	624817	15-02-2024	DASEP KURNIA GUNARUDIN, S.H., M.M.	#PK Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Kayu-kayuan	Kp.Lengkong Rt03/Rw04 Desa Sugihmukti Kec.Pasirjambu, Kab. Bandung	26.128	435	Peserta	11.365.680	Non Belanja Transfer	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi
1496	645564	20-02-2024	DEDI SAEPUL ROHMAN, S.H.	#PK Mesin Pencacah Sampah	Kp Babakan Wangi RW 014 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung	26.375.000	1	Unit	26.375.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1641	651662	21-02-2024	DILAR RINALDI, S.Psi	#PK Sosialisasi dan Penanaman Pohon Multy Purpose Tree Species (MPTS) Kayu-kayuan	KP CIGOROWONG RT 04 RW 12 DESA NAGREG KEC. NAGREG, Kab. Bandung	26.128	700	Peserta	18.289.600	Non Belanja Transfer	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2199	667923	23-02-2024	Drs. EDI TARDIANA	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp. Sayang RT 01 RW 08 Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3557	697189	26-02-2024	Drs. H. MA"MUN IRAWAN	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	RT 03 RW 06, Ds. Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung	4.009.000	1	Unit	4.009.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3558	697242	26-02-2024	Drs. H. MA"MUN IRAWAN	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	RT 03 RW 07, Ds. Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung	4.009.000	2	Unit	8.018.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
554	569230	29-01-2024	ELIN WATI	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Palawija RW 10, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	4.009.000	3	Unit	12.027.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
583	569859	29-01-2024	ELIN WATI	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Bojong Picung RT 03 RW 04, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	4.009.000	1	Unit	4.009.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
724	572764	30-01-2024	ELIN WATI	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Cikawao Rt 05 RW 12, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	4.009.000	1	Unit	4.009.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
821	579353	31-01-2024	ELIN WATI	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Buluh RT 03 RW 17, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	4.009.000	1	Unit	4.009.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3536	694547	26/02/2024	ERWIN GUNAWAN	#PK Sosialiasasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Skala Industri/UMKM	Kp. Bojongpulus, Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung	185.380	120	Peserta	22.245.600	Non Belanja Transfer	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1514	645911	20-02-2024	H. AGUS JAENUDIN, S.I.Kom	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Cigondewah Hilir RT.02 RW.02 Desa. Cigondewah Hilir Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung ***(Semula RT 4)***	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3744	724662	29-02-2024	ERWIN GUNAWAN	#PK Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	Kp. Kalapa Tilu, Desa Rancatungku, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung	1.247.904	18	Peserta	22.462.272	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3228	677712	24-02-2024	H. AGUNG YANSUSAN, S.T., MUD	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	Desa ciapus Kec.Banjaran, Kab. Bandung	3.798.000	3	Unit	11.394.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3048	676356	24-02-2024	H. FIRMAN B. SUMANTRI, MBA	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	RW 17 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah , Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2579	674530	23-02-2024	H. OTJO SUTISNA	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	kantor desa panyadap (BUMDES PANYADAP), Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2058	664089	22-02-2024	H. TEDI SUPRIADI, S.Pd.I, M.Si	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Jl. Sayati Hilir RT 04 RW 08 Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	4.009.000	3	Unit	12.027.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2059	664109	22-02-2024	H. TEDI SUPRIADI, S.Pd.I, M.Si	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Cibogo RT 02 RW 08 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang, Kab. Bandung	4.009.000	3	Unit	12.027.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2505	674112	23-02-2024	H. UUS HAERUDIN FIRDAUS, S.H.I	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	KP PASAR KEMIS RW 14 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	4.009.000	3	Unit	12.027.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2509	674203	23-02-2024	H. UUS HAERUDIN FIRDAUS, S.H.I	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	KP BOJONG MALAKA RT 01 / RW 001 , DESA BOJONG MALAKA , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	4.009.000	2	Unit	8.018.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2186	667085	23-02-2024	H. UYA MULYANA, S.H.I	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp Burujul RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 17 Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung	4.009.000	2	Unit	8.018.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2971	676099	24-02-2024	H. UYA MULYANA, S.H.I	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	RT 02 RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	4.009.000	2	Unit	8.018.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3015	676251	24-02-2024	H. UYA MULYANA, S.H.I	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	RW 03 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	4.009.000	2	Unit	8.018.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3040	676331	24-02-2024	H. UYA MULYANA, S.H.I	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	RW 17 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	3.798.000	1	Unit	3.798.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2608	674684	23-02-2024	HEN HEN ASEP SUHENDAR	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp Cisondari Rw 2 Desa Cisondari Kec Pasirjambu, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
920	599514	05-02-2024	H. YANTO SETIANTO, S.E., M.M.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Jalan Antasari Rt 07 Rw 02 Desa Dayeuhkolot Kec.Dayeuhkolot, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
922	599563	05-02-2024	H. YANTO SETIANTO, S.E., M.M.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Jl.Bojong Asih Rt 03 Rw 05 Desa dayeuhkolot kec.Dayeuhkolot, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
927	599700	05-02-2024	H. YANTO SETIANTO, S.E., M.M.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Jl.Akasia Rt 04 Rw 18 desa lagar kec.Margaasih , Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
944	600079	05-02-2024	H. YANTO SETIANTO, S.E., M.M.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Warga jln.sadang Rt 01 Rw 09 Desa Margahayu Tengah Kec.Margahayu , Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2589	674613	23-02-2024	HEN HEN ASEP SUHENDAR	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp Tanjung Rt 1 Rw 6 Desa Tanjungsari Kec Cangkuang, Kab. Bandung ***(semula RW 5)***	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3507	679241	24-02-2024	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp. Sindangsari RW. 21 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
246	545659	23-01-2024	Hj. EVI RIYANTY, SIP	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	kelompok masyarakat saung dalapan kp. cikopo rt 04 rw 08 desa bumiwangi kecamatan ciparay, Kab. Bandung	4.009.000	4	Unit	16.036.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1506	645791	20-02-2024	Hj. RENIE RAHAYU FAUZI	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 0,84 m3	Kp Ebah Rt 1 rw 2 Ds Cipaku Kec Paseh, Kab. Bandung	3.798.000	3	Unit	11.394.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1213	630179	17-02-2024	MAULANA FAHMI, S.Si.	#PK Mesin Pencacah Sampah	Kp pintu aer rt 01, rw 02 desa rancaekek Kulon Kecamatan rancaekek, Kab. Bandung	26.375.000	1	Unit	26.375.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2377	672680	23-02-2024	OSIN PERMANA, M.Ag.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp. Madur RT. 01/04 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2820	675355	24-02-2024	PRANIKO IMAM SAGITA	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp. Ciganitri RT 002 RW 007 Ds. Cipagalo Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2948	676016	24-02-2024	PRANIKO IMAM SAGITA	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	RW 009 Ds. Cipagalo Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3430	678696	24-02-2024	RENDY RIZKI CAHYADI, SH	#PK Pembuatan Persemaian	KP KEBONTUNGGUL RT.01 RW.05 DESA PASIRHUNI KECAMATAN CIMAUNG, Kab. Bandung	62.647.500	1	Unit	62.647.500	Non Belanja Transfer	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan Rehabilitasi
1377	638683	19-02-2024	RIKI GANESA , S.Hut	#PK Bimbingan Teknis Konservasi Sumber Daya Air (KSDA)	desa cibiru hilir, desa cinunuk, desa cibiru wetan, desa cimerkar, desa cileunyi kulon dan desa cileunyi wetan kec cileunyi, Kab. Bandung	546.560	40	Peserta	21.862.400	Non Belanja Transfer	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2894	675725	24-02-2024	SANDI SUDRAJAT	#PK Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah	KP RANCA KENDAL DESA TANGSI MEKAR, Kab. Bandung	1.247.904	4	Peserta	4.991.616	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
2902	675749	24-02-2024	SANDI SUDRAJAT	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	KP RANCA KENDAL DESA TANGSI MEKAR KECAMATAN PASEH, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1595	649503	21-02-2024	TATANG SUDRAJAT, S.H.I	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	kp salamanjah rt 01 rw 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3337	678303	24-02-2024	TEDI SURAHMAN, S.E.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp. cangkuang rt.01 rw.01 desa cangkuang wetan kec.dayeuhkolot, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	HARGA SATUAN/ASB	VOLUME ACC	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
3379	678510	24-02-2024	TEDI SURAHMAN, S.E.	#PK Roda Sampah Dari Plat Besi Kapasitas 1 m3	Kp. Pasar Sayati Lama RT.05 RW.05 Desa Sayati Kec. Margahayu, Kab. Bandung	4.009.000	3	Unit	12.027.000	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2482	673963	23-02-2024	TETE KUSWARA	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	RW 04 Desa Patrolsari Kecamatan Arjsari, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3626	702770	27-02-2024	YAYAT SUMIRAT, S.H.	#PK Kendaraan Motor Roda Tiga (Cator)	Kp Giriharja Rt 1 Rw 1 Kel jelekong Kec baleendah, Kab. Bandung	38.929.500	1	Unit	38.929.500	Non Belanja Transfer	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

BANDUNG
BEDAS!



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Startegis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 serta dilakukan beberapa penyesuaian. Berikut ini merupakan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2025

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							DINAS LINGKUNGAN HIDUP			109.052.448.410,00				
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			109.052.448.410,00				
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			109.052.448.410,00				
1	2	11	01			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD	78,00 Poin 78,25 Poin 92,00 %	45.884.181.385,00				
	2	11	01	2.01		Tercapainya Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 Persen	107.000.000,00			Internal	
	2	11	01	2.01	0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	01	2.01	0002	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.01	0003	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.01	0004	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.01	0005	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	01	2.01	0006	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.01	0007	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
								Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.02		Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	28.753.592.785,00			Inernal	
	2	11	01	2.02	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	28.743.592.785,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Inernal	
	2	11	01	2.02	0007	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inernal	
	2	11	01	2.05		Tercapainya Pemenuhan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	100Persen
	2	11	01	2.05	0005	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	01	2.06		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	349.445.000,00			Internal	
	2	11	01	2.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.06	0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.828.300,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Internal	
	2	11	01	2.06	0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.06	0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.06	0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.06	0008	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	8.250.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.06	0009	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	139.866.700,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.08		Tercapainya pemenuhan dokumen laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15.846.873.600,00			Internal	
	2	11	01	2.08	0001	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.08	0002	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.08	0004	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	391 Laporan	15.041.873.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.09		Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	519.770.000,00			Internal	

BANDUNG BEDAS!

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	01	2.09	0001	Teredianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122 Unit	447.270.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.09	0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.09	0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
	2	11	01	2.11		Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya insentif KDH WKDH	2 Orang/Bulan	297.500.000,00			Internal	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	01	2.11	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	297.500.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Internal	
2	2	11	02			Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS)	70 %	276.000.000,00				
	2	11	02	2.01		Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH	100 %	276.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	02	2.01	0002	Tersusunnya Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota							
								Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	02	2.01	0006	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota							
								jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
3	2	11	03			Tercapainya Pengendalian Pencemaaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	100 % 49,37 Poin	1.183.434.260,00				

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	03	2.01		Terselenggaranya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1 Dokumen	271.250.200,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	03	2.01	0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	271.250.200,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	03	2.02		Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan	Perubahan BSO Dokumen 1 Dokumen	487.187.180,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	03	2.02	0001	Terselenggaranya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat							
						Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	350.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	03	2.02	0002	Terlaksananya Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
								Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	137.187.180,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	03	2.03		Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah area tertanami (ha)	4 ha	424.996.880,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	03	2.03	0009	Terpenuhinya Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan rehabilitasi							
								luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 Ha	424.996.880,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
4	2	11	04			Terbangunnya Taman Kehati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengembangan Taman Kehati	87,5 %	469.190.000,00				
	2	11	04	2.01		Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun	Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur terbangun 90 %	469.190.000,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	04	2.01	0004	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
						Terlaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18.5 Ha	400.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	04	2.01	0009	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan							
								Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	69.190.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	11	06			Terselenggaraya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi	100 %	103.983.600,00				
	2	11	06	2.01		Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1 Dokumen	103.983.600,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	06	2.01	0001	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							

BANDUNG BEDAS!

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen	23.006.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	06	2.01	0009	Terciptanya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hakk MHA yang terkait dengan RPPLH	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
								Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	110 Badan Usaha	80.977.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
6	2	11	07			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial	100 %	242.025.600,00				
	2	11	07	2.02		Tersusunnya Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega)	1 Laporan 1 Laporan	242.025.600,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	

BANDUNG BEDAS!

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	07	2.02	0001	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH							
								Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	242.025.600,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
7	2	11	08			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa Berbudaya Lingkungan	62,5 %	70.967.839,00				
	2	11	08	2.01		Tersusunnya Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	10 Laporan	70.967.839,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	08	2.01	0002	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup							

BANDUNG BEDASI

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	70.967.839,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
8	2	11	09			Terselenggaranya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh	52 %	50.000.000,00				
	2	11	09	2.01		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh	80 Penggghargaan	50.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	09	2.01	0001	Terbangunnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
								Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80 Entitas	50.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2	11	10			Terselenggaranya penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	100 %	160.000.000,00				
	2	11	10	2.01		Tersusunnya laporan hasil penegakan hukum dan laporan penanganan pengaduan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum	2 Laporan	160.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	10	2.01	0004	Terpenuhinya pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
								Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 Pengaduan	60.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	10	2.01	0006	Terlaksananya penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota							

BANDUNG BEDAS!

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara	100.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
10	2	11	11			Terkelolanya Sampah di Kabupaten Bandung	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42 %	60.612.665.726,00				
	2	11	11	2.01		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Volume Sampah Persentase Penanganan Volume Sampah	29,72 Persen 63,7 Persen	60.612.665.726,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	11	2.01	0004	Terbangunnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							
								Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	454.869.732,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	11	2.01	0005	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	

BANDUNG BEDAS!

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	11	2.01	0007	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	25.295.298.319,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	11	2.01	0008	Tersusunnya dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								
								Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	11	2.01	0020	Terlaksananya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
								jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	43800 Ton	34.832.497.675,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	43800 Ton
	2	11	11	2.01	0021	Tersusunnya dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan							
								jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	1 Dokumen
							UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah			3.007.896.000,00				
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.007.896.000,00				
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3.007.896.000,00				
11	2	11	11			Terkelolanya Sampah di Kabupaten Bandung	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang terkelola	93,42 %	3.007.896.000,00				
	2	11	11	2.01		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Volume Sampah Persentase Penanganan Volume Sampah	29,72 Persen 63,7 Persen	3.007.896.000,00			-	

BANDUNG BEDAS!

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	11	11	2.01	0019	Terlaksananya pengurangan sampah melalui proses daur ulang sampah	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah							
								Jumlah sampah yang terdaur ulang	33000 Ton	3.007.896.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
							UPTD Laboratorium Lingkungan			1.559.054.761,00				
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.559.054.761,00				
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			1.559.054.761,00				
12	2	11	01			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai BMD	78,25 Poin 92 %	1.489.054.761,00				
	2	11	01	2.10		Meningkatnya Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,11 Poin	1.489.054.761,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	01	2.10	0001	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.489.054.761,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Masyarakat Kabupaten Bandung	

No	Kode					Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Catatan Penting
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	2	11	03			Tercapainya Pengendalian Pencemaaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	100 % 49,37 Poin	70.000.000,00				
	2	11	03	2.01		Terselenggaranya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (IGRK/KSDA)	1 Dokumen	70.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Bandung	
	2	11	03	2.01	0015	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
								Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2743 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Bandung	
									J U M L A H	**113.619.399.171,00**				

BANDUNG BEDAS!

BAB V
PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Pada Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Namun pada proses penyusunan Rancangan terdapat penyesuaian belanja Musrenbang (Hasil Forum PD) dan penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan pada Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 terdapat penyesuaian belanja Pokir, Belanja Rembug Bedas serta pemenuhan belanja wajib mengikat lainnya. Berikut ini merupakan historis penyesuaian Pagu Belanja terhadap Pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

1. Pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebesar Rp.85.713.132.781;
2. Pada Tahap Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Terdapat Penyesuaian:
    a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.037.51.517;
    b. Belanja Musrenbang sebesar Rp. 2.959.446.864;
    c. Belanja Musrenbang Musti sebesar Rp. 238.280.000.

    Sehingga Pagu Indikatif Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 89.948.111.162.
3. Pada Tahap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Terdapat Penyesuaian:
    a. Belanja SILPA BLUD sebesar Rp. 189.054.761;
    b. Belanja Rembug Bedas sebesar Rp. 21.440.000.000 (Penyediaan Armada Sampah);
    c. Belanja Pokir sebesar Rp. 1.192.233.248;
    d. Belanja Pemenuhan Wajib mengikat sebesar Rp. 750.000.000 (Belanja Honor Badega, belanja honor pembibitan, belanja sewa kendaraan operasional serta pemenuhan belanja rutin lainnya yang belum terpenuhi).

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Strateggis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

5.3 RENCANA TINDAKLANJUT

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Soreang, 29 Juli 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

TTD

ASEP KUSUMAH

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

BANDUNG BEDAS!

KATA PENGANTAR

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah saya haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas karunia dan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Kajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hiudp Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penyusunan Kajian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98, seperti perubahan peraturan, perubahan visi dan misi, atau perubahan kondisi internal dan eksternal instansi].

Pada Kajian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan selama periode 2025. Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, antara lain:

a) Dokumen RPJMD 2021-2026 dan Dokumen RKPD Tahun 2025
b) Peraturan dan kebijakan yang berlaku;
c) Hasil monitoring dan evaluasi Renja sebelumnya;
d) Berbagai usulan dari Stakeholder.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Kajian Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada Tanggal, Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

ASEP KUSUMAH, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah (Renja PD). Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Permendagri 86/2017).

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Namun pada Proses penyusunan Renja Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil Forum PD, Belanja Pokir, Pemenuhan Belanja Wajib Mengikat sehingga diperlukan kajian Penyusunan Renja Tahun 2025.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pada Tahap Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Namun pada proses penyusunan Rancangan terdapat penyesuaian belanja Musrenbang (Hasil Forum PD) dan penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan pada Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 terdapat penyesuaian belanja Pokir, Belanja Rembug Bedas serta pemenuhan belanja wajib mengikat lainnya. Berikut ini merupakan historis penyesuaian Pagu Belanja terhadap Pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

1. Pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebesar Rp.85.713.132.781;
2. Pada Tahap Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Terdapat Penyesuaian:
    a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.037.51.517;
    b. Belanja Musrenbang sebesar Rp. 2.959.446.864;
    c. Belanja Musrenbang Musti sebesar Rp. 238.280.000.

    Sehingga Pagu Indikatif Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 89.948.111.162.
3. Pada Tahap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Terdapat Penyesuaian:
    a. Belanja SILPA BLUD sebesar Rp. 189.054.761;
    b. Belanja Rembug Bedas sebesar Rp. 21.440.000.000 (Penyediaan Armada Sampah);
    c. Belanja Pokir sebesar Rp. 1.192.233.248;
    d. Belanja Pemenuhan Wajib mengikat sebesar Rp. 750.000.000 (Belanja Honor Badega, belanja honor pembibitan, belanja sewa kendaraan operasional serta pemenuhan belanja rutin lainnya yang belum terpenuhi).

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini adalah untuk menyelaraskan dengan Visi dan Misi kabupaten Bandung serta penyesuaian terhadap kondisi terkini.

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama, adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra 2021-2026 yaitu Target IKLH sesuai dengan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026;
2. Evaluasi dan Monitoring, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 masih terdapat capaian kinerja dibawah 100% jika dibandingkan terhadap target alhir Renstra.Sehingga diperlukan penyesuaian Renja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan organisasi;
3. Kebutuhan Pendanaan, pada kerangka pendanaan yang termuat dalam Renstra belum mengakomodir belanja Musrenbang dan Pokir sehingga diperlukan penyesuaian Renja untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai.

C. DASAR HUKUM

Ranperbup Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini disusun berdasarkan landasan hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);

BAB 2

POKOK PIKIRAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Lingkunagn Hidup Tahun 2025 disusun, telah dilakukan beberapa penyesuaian pada Tahap Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2025 dan dinamika lingkungan strategis.

Perubahan internal antara lain:

a) Reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
b) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

Perubahan eksternal antara lain:

a) Dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang pesat.
b) Adanya dampa Pasca Kebakaran TPA Sarimukti yang mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah melalui penagdaan armada sampah..

Perubahan-perubahan tersebut menuntut Dinas Lingkungan Hiudp untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja 2025.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan langkah penting untuk merespon perubahan yang terjadi dan meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Urusan di Bidang Lingkungan Hidup. Sehingga Renja Tahun 2025 ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan Dinas LIngkungan Hidup melalui Perencanaan yang efektif dan efisien.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyesuaikan Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan perubahan RKPD dan dinamika lingkungan strategis.

Memastikan Renja Dinas Lingkungan Hidup tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang Urusan Perpustakaan dan Arsip.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif, efektif, dan tepat sasaran

C. RUANG LINGKUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 meliputi:

a) Tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
b) Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renja.
c) Kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Renja.

D. TAHAPAN PENYUSUNAN

a) Analisis dan kajian terhadap perubahan RKPD dan dinamika lingkungan strategis.
b) Fokus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait.
c) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentangRenja Dinas Lingkungan Hidup.
d) Konsultasi publik terhadap Ranperbup.
e) Penetapan Ranperbup menjadi Perbup tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup.

E. MANFAAT

a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup.
b) Meningkatnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian Indikator Kinerja Utamayang telah ditetapkan.
c) Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Urusan Bidang Lingkungan Hidup.

F. HARAPAN

Dengan penyusunan Ranperbup Renstra Perubahan ini, diharapkan meningkatnya pengelolaan Urusan Bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerahdi Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB 3
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Kajian Ranperbup Renja Dinas Lingkungan Hidup ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

Metode ini dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data: Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dokumen Visi dan Misi Kabupaten Bandung, peraturan perundang- undangan terkait, dan data statistik pembangunan Kabupaten Bandung.

2. Analisis data: Data dan informasi yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui relevansi Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung.

3. Rumusan rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan rekomendasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Falsafah yang mendasari Ranperbup Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Good Governance: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik dan bersih.
2. Public Service Excellence: Memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Kebijakan yang ingin dicapai melalui Ranperbup Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
3. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Urusan Bidang Lingkungan Hidup

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Ranperbup Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini meliputi :

1. Identifikasi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan Urusan Bidang Lingkungan Hidup yang perlu diakomodasi dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.
2. Analisis perubahan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang perlu direspon dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.
3. Rumusan rekomendasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025.

BAB 4
PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini merupakan respons terhadap dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup, serta upaya untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang Lingkungan Hidup.

Pada Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Penyusunannya dilakukan dengan partisipasi aktif dari masyarakat serta stakeholder terkat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Kajian Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

ASEP KUSUMAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 003

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA